

**INDEKS DISPARITAS  
TINGKAT HIDUP  
ANTAR PROVINSI**

<http://www.bps.go.id>

**INDEKS DISPARITAS  
TINGKAT HIDUP ANTAR PROVINSI**

ISBN: 979-724-058-4

No. Publikasi: 04410.0304

Katalog BPS: 4719.

Ukuran Buku: 16 cm x 21,84 cm

*Naskah:*

Sub-Direktorat Analisis Statistik Lintas Sektor

*Gambar Kulit:*

Sub-Direktorat Analisis Statistik Lintas Sektor

*Diterbitkan oleh:*

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

*Dicetak oleh:*

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

<http://www.bps.go.id>

**INDEKS DISPARITAS  
TINGKAT HIDUP ANTAR PROVINSI**

*Naskah:*

Sub-Direktorat Analisis Statistik Lintas Sektor

*Pengarah:*

Wynandin Imawan

*Penyunting:*

Hamonangan Ritonga

Wachyu Winarsih

*Penulis:*

Wachyu Winarsih

Rustam

Budiasih

Ahmad Avenzora

*Pengolah Data dan Draft:*

Rustam

Puspita Handayani

<http://www.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi ini berisi penjelasan konsep/definisi dan analisis perkembangan dari beberapa indikator sosial dan ekonomi yang dihitung dengan Metode Taksonomik. Indikator sosial ekonomi yang digunakan dalam analisis ini mencakup indikator perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesenangan/sosial budaya. Indeks ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap hasil-hasil program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari indikator-indikator sosial ekonomi masyarakatnya.

Indikator-indikator yang disajikan dalam publikasi ini mencakup data tahun 1999 dan sebagian data tahun 2000. Data tersebut bersumber dari berbagai publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan draft hingga penerbitan publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca pada publikasi ini akan kami terima dengan senang hati.

Akhir kata kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Desember 2002  
Kepala Badan Pusat Statistik,

DR. Soedarti Surbakti  
NIP: 340001648



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN TABEL-TABEL.....	v
ABSTRAKSI .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penulisan.....	3
1.3. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Data .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. METODOLOGI.....</b>	<b>7</b>
2.1. Kajian Pustaka .....	7
2.2. Pemilihan Variabel.....	12
2.3. Metode Analisis.....	32
2.3.1. Analisis Deskriptif.....	32
2.3.2. Metode Taksonomik.....	32
<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Analisis Deskriptif.....	39
3.1.1. Potensi Perekonomian Daerah .....	40
3.1.2. Indikator Perumahan.....	43
3.1.3. Indikator Pendidikan .....	44
3.1.4. Indikator Ketenagakerjaan.....	47
3.1.5. Indikator Kesehatan .....	49
3.1.6. Indikator Kesenangan/Sosial Budaya.....	52
3.1.7. Indikator Secara Umum .....	54
3.2. Metode Taksonomik.....	54
3.2.1. Indeks Tingkat Hidup Antar Provinsi Secara Terpisah.....	55
3.2.2. Indeks Tingkat Hidup Antar Provinsi Secara Menyeluruh .....	66
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN TABEL-TABEL .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
3.1.	Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Indikator dan Provinsi Tahun 1999.	56
3.2.	Peringkat Indeks Disparitas PDRB Antar Provinsi Tahun 1999	58
3.3.	Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Keseluruhan Variabel Tahun 1999	67

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
3.1.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 1999	41
3.2.	Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi-Provinsi di Indonesia, 1999 (dalam juta rupiah)	42
3.3.	Beberapa Indikator Perumahan Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 1999	43
3.4.	Beberapa Indikator Pendidikan Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 1999	45
3.5.	Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 1999	48
3.6.	Beberapa Indikator Kesehatan Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 1999	51
3.7.	Beberapa Indikator Kesenangan/Sosial Budaya Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 2000	53
3.8.	Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Perumahan	59
3.9.	Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Pendidikan	61

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
-----	--------------	---------

3.10.	Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Ketenagakerjaan	62
3.11.	Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Kesehatan	64
3.12.	Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Kesenangan/ Sosial Budaya	65
3.13.	Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Keseluruhan Variabel	68

#### **DAFTAR LAMPIRAN TABEL-TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.a.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 1999 (Juta Rupiah)	79
1.b.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 1999 (Juta Rupiah)	81
1.c.	Distribusi Persentase PDRB Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 1999	83
1.d.	Distribusi Persentase PDRB Sektor Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Provinsi, 1999	85
1.e.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 1999	87
1.f.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha, 1999	89

#### **DAFTAR LAMPIRAN TABEL-TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan dan Provinsi, 1999	91
3.	Beberapa Karakteristik Pendidikan Penduduk Menurut	92



	Provinsi, 1999	
4.	Beberapa Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Menurut Provinsi, 1999	93
5.	Beberapa Karakteristik Kesehatan Penduduk Menurut Provinsi, 1999	94
6.	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Beberapa Indikator Kesenangan/Sosial Budaya dan Provinsi, 2000	95
7.a.	Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Keseluruhan Variabel, 1999	96
7.b.	Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Variabel Perumahan, 1999	97
7.c.	Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Variabel Pendidikan, 1999	98
7.d.	Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Variabel Ketenagakerjaan, 1999	99
7.e.	Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Variabel Kesehatan, 1999	100
7.f.	Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Variabel Kesenangan/ Sosial Budaya, 2000	101
8.	Pendekatan Konsep Pekerja Informal di Indonesia Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama	102
9.	Rata-Rata dan Standar Deviasi Beberapa Variabel Terpilih dalam Penghitungan Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi 1999	103

## ABSTRAKSI

Studi tingkat hidup penduduk dikaitkan dengan potensi perekonomian daerah menjadi isu penting berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Penetapan berbagai kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tentu saja mengandung berbagai konsekuensi positif dan negatif tergantung kepada latar belakang dan keadaan suatu daerah. Melalui studi ini di samping akan terlihat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sekaligus juga akan terlihat ketimpangan pembangunan yang telah terjadi selama ini dan juga sukses suatu daerah dalam mengelola potensi perekonomian yang dimilikinya.

Data yang digunakan dalam studi ini sebagian besar diperoleh dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional. Untuk kelengkapan studi juga digunakan data Produk Domestik Regional Bruto yang dimaksudkan untuk melihat gambaran potensi perekonomian suatu daerah.

Dalam studi ini, tingkat hidup penduduk dilihat melalui lima indikator yaitu perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan juga indikator kesenangan/sosial budaya. Analisis dilakukan dalam dua tahap, yaitu: analisis berdasarkan indikator tunggal dan analisis berdasarkan indikator komposit (gabungan). Di samping analisis tingkat hidup juga dilakukan analisis Produk Domestik Regional Bruto. Tahap selanjutnya, analisis akan digiring dengan melihat keterkaitan antara tingkat hidup penduduk suatu provinsi dengan potensi perekonomian yang dimilikinya.

Baik analisis tingkat hidup maupun analisis Produk Domestik Regional Bruto keduanya menggunakan metoda yang sama yaitu Metoda Taksonomik. Dari Metoda Taksonomik akan diperoleh dua ukuran, yaitu: 1). Pola Pembangunan dan 2). Ukuran Pembangunan. Kedua ukuran tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam menentukan besaran indeks. Sedangkan nilai dari Ukuran Pembangunan digunakan untuk menentukan peringkat indeks.

Analisis dilakukan dengan menetapkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai provinsi model/acuan. Pertimbangannya adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki banyak keunggulan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya baik dalam hal tingkat hidup maupun keadaan perekonomian daerahnya. Sebagai gambaran, dari 29 variabel tingkat hidup yang diamati, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menduduki peringkat terbaik untuk sekitar 16 variabel.

Dari hasil penyusunan indeks disparitas tingkat hidup berdasarkan indikator perumahan ditemukan provinsi-provinsi dengan kondisi

perumahan terbaik ditempati Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diikuti Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi-provinsi dengan kondisi perumahan terburuk adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada peringkat terakhir, Provinsi Irian Jaya pada peringkat ke-25 dan Provinsi Kalimantan Barat pada peringkat ke-24. Ketertinggalan pembangunan perumahan terlihat berkaitan dengan rendahnya potensi perekonomian daerah tersebut, seperti ditunjukkan oleh indeks disparitas Produk Domestik Regional Bruto tahun 1999 dimana untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menduduki peringkat terburuk.

Di bidang pendidikan peringkat terbaik ditempati oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diikuti Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kondisi terburuk terjadi di Provinsi Irian Jaya, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketertinggalan pendidikan di Provinsi Irian Jaya tampaknya diakibatkan ketimpangan dalam program pembangunan, karena dari indeks disparitas Produk Domestik Regional Bruto tahun 1999 Provinsi Irian Jaya masih menduduki peringkat yang cukup baik yaitu pada peringkat ketujuh.

Di bidang ketenagakerjaan, ketertinggalan lagi-lagi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Irian Jaya, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan provinsi-provinsi yang mengalami kemajuan adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada peringkat pertama, diikuti Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Sukses pembangunan di bidang kesehatan juga diraih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada peringkat kedua dan Provinsi Bali pada peringkat ketiga. Sementara ketertinggalan dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat pada peringkat terakhir, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti halnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketertinggalan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat nampaknya juga berkaitan dengan potensi perekonomian yang kurang mendukung seperti ditandai dengan indeks disparitas Produk Domestik Regional Bruto tahun 1999 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga menduduki peringkat buruk yaitu peringkat ke-24.

Partisipasi penduduk dalam kegiatan rekreasi/sosial budaya tertinggi terjadi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diikuti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali. Sedangkan partisipasi terendah terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diikuti Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jika analisis dilakukan berdasarkan indeks disparitas tingkat hidup dari keseluruhan variabel (perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan

dan kesenangan/sosial budaya), provinsi dengan peringkat terbaik ditempati Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diikuti Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sumatera Utara. Sukses pembangunan di provinsi-provinsi tersebut tampaknya didukung oleh potensi perekonomian daerah tersebut yang juga relatif tinggi. Lepas dari keberhasilan yang telah diraih, provinsi-provinsi tersebut juga masih memerlukan berbagai pembenahan untuk mencapai kualitas tingkat hidup yang lebih baik lagi. Sebagai contoh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih perlu pembenahan dalam hal akses penduduk terhadap air bersih, dan Provinsi Sumatera Utara masih memerlukan pengembangan di bidang kesehatan dan juga partisipasi penduduk dalam kegiatan kesenangan/sosial budaya.

Berdasarkan analisis keseluruhan variabel juga diperoleh provinsi-provinsi dengan tingkat hidup yang paling tertinggal, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, diikuti Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketertinggalan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat tampaknya berkaitan dengan potensi perekonomiannya yang kurang memadai. Sementara untuk Provinsi Irian Jaya, dengan potensi perekonomian yang cukup memadai selayaknya derajat tingkat hidup penduduk masih bisa ditingkatkan jauh lebih baik lagi.

<http://www.bps.go.id>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era reformasi yang telah berlangsung semenjak jatuhnya pemerintahan Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berpolitik, misalnya, telah terjadi penambahan partai politik, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding era Orde Baru. Perubahan lain yang tak kalah pentingnya adalah dicanangkannya pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai konsekuensi dari tuntutan pemerataan pembangunan di daerah hingga pada tingkat Kabupaten/Kota. Penerapan Otonomi Daerah ini membagi dan menetapkan berbagai kewenangan tertentu antara Pusat dan Daerah dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan ini tentu saja melahirkan warna baru dengan dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya terhadap tingkat hidup masyarakat di daerah.

Meskipun dalam hal kebijakan dan kewenangan tertentu pemerintah pusat masih memegang kendali dan memiliki kewenangan mutlak, namun tanpa mempersoalkan apakah hasil-hasil pembangunan sudah berubah dengan adanya otonomi daerah, latar belakang dan keadaan suatu daerah dapat mengakibatkan adanya perbedaan tingkat hidup antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Tingkat hidup suatu provinsi sangat dipengaruhi oleh berbagai potensi yang dimilikinya, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya lainnya. Perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah ini mendorong perlunya dibentuk suatu indeks disparitas yang dapat digunakan sebagai ukuran baku dalam membandingkan tingkat hidup suatu provinsi dengan provinsi lain. Namun patut disadari bahwa ukuran ini hanyalah merupakan suatu ringkasan atau pendekatan empiris dari sekian banyak faktor atau variabel yang harus digunakan secara menyeluruh. Meskipun indeks disparitas ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan faktor-faktor atau variabel tingkat hidup secara menyeluruh, namun secara statistik telah dilakukan berbagai pengujian-pengujian dalam memenuhi keterwakilan dari komponen penentu secara menyeluruh.

Dampak krisis ekonomi Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 terhadap tingkat hidup masyarakat secara umum berbeda antara

suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan dampak tersebut dapat dicerminkan dalam indikator-indikator yang merupakan akibat, yang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu: (1) indikator perumahan, antara lain meliputi : persentase rumahtangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah, persentase rumahtangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, persentase rumahtangga yang memiliki lantai rumah sebagian besar dari tanah, persentase rumahtangga yang memiliki sendiri fasilitas buang air besar, dan persentase rumahtangga yang memiliki tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran/tinja ; (2) indikator pendidikan, yang antara lain meliputi : persentase penduduk 10 tahun ke atas yang buta huruf, persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan diploma ke atas, angka partisipasi sekolah (untuk kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun), dan rasio murid guru (tingkat SD, SLTP, dan SLTA); (3) indikator ketenagakerjaan, antara lain meliputi : persentase penduduk yang bekerja, persentase pekerja yang jumlah jam kerja per minggu <14 jam dan <35 jam, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran terbuka, dan jumlah pekerja di sektor informal; (4) indikator kesehatan, antara lain meliputi : angka harapan hidup, angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup), persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan yang lalu, persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan pengobatan sendiri, persentase balita kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga medis, dan rata-rata lamanya sakit (hari); dan (5) indikator kesenangan/sosial budaya, antara lain meliputi : persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menonton televisi seminggu yang lalu, mendengarkan siaran radio seminggu yang lalu, membaca surat kabar seminggu yang lalu, membaca majalah/tabloid seminggu yang lalu, membaca buku cerita seminggu yang lalu, dan berolahraga dengan jalur melakukan sendiri seminggu yang lalu.

Sebaliknya indikator-indikator yang menjadi penyebab kenapa masyarakat di daerah tertentu memiliki tingkat hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain dikategorikan sebagai indikator penyebab. Indikator ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu : (1) indikator pendapatan, antara lain meliputi : pendapatan per kapita per tahun, gini ratio, persentase pekerja di sektor pertanian, persentase pekerja di sektor industri pengolahan, rata-rata tingkat upah di sektor pertanian, dan rata-rata upah di sektor industri; dan (2) indikator pendidikan, antara lain meliputi : persentase pekerja yang menamatkan pendidikan terakhir SLTA, dan persentase pekerja yang menamatkan pendidikan terakhir Diploma III ke atas.

Dengan mengetahui informasi perbedaan tingkat hidup antar suatu daerah dengan daerah lainnya tentunya akan memudahkan pemerintah, khususnya instansi/lembaga donor, untuk mengefektifkan program mereka yang berkaitan dengan masalah tingkat hidup. Kemudian dengan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab adanya disparitas tingkat hidup antar daerah akan memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan guna memperkecil disparitas tingkat hidup. Berdasarkan pengalaman, melaksanakan suatu program dengan menitik beratkan sasaran pada outputnya saja tidak akan sepenuhnya dapat menuntaskan suatu masalah. Sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah program tersebut harus menyentuh faktor input dan proses yang menjadi penyebab suatu masalah.

## 1.2 Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, tujuan penulisan publikasi ini adalah:

- a. Memberikan gambaran mengenai penggunaan Metode Taksonomik dalam menyusun indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi.
- b. Menyusun indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi yang merupakan indeks menyeluruh (*composite index*) berdasarkan beberapa variabel/indikator sosial ekonomi untuk setiap provinsi.
- c. Menentukan peringkat tingkat hidup suatu provinsi pada suatu tahun tertentu berdasarkan nilai indeks disparitas tingkat hidup yang diperoleh sebelumnya.
- d. Membandingkan peringkat tingkat hidup suatu provinsi dengan provinsi lainnya untuk melihat dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antar provinsi.

## 1.3 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Data

Ruang lingkup dalam publikasi ini meliputi seluruh provinsi di Indonesia yang masih menggunakan batasan wilayah administrasi provinsi lama yaitu sebanyak 26 provinsi (tidak termasuk Provinsi Timor Timur yang sudah lepas dari Negara Kesatuan RI semenjak tahun 1999). Penelitian ini menggunakan provinsi sebagai unit observasi terkecil dalam membandingkan indeks disparitas yang dihasilkan. Berbagai sumber data

yang sudah dipublikasikan di masing-masing provinsi, dengan segala keterbatasannya sebagai dampak dari perbedaan potensi antar daerah, akan turut mempengaruhi penelitian ini. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa indeks ini masih perlu disempurnakan.

Salah satu keterbatasan data dalam publikasi ini adalah adanya beberapa variabel yang dianalisis dengan menggunakan tahun dasar yang berbeda. Akan tetapi, untuk setiap variabel yang sama pada provinsi-provinsi yang berbeda-beda digunakan tahun dasar yang sama. Secara umum publikasi ini menggunakan data-data tahun 1999 sehingga hasil dan keadaan yang digambarkan menjadi mendekati keadaan pada tahun yang bersangkutan. Diharapkan indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi ini dapat digunakan untuk melihat dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai secara menyeluruh.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Publikasi ini dibagi dalam empat bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan, cakupan penelitian dan keterbatasan data, serta sistematika penulisan. Bab II merupakan bab metodologi yang menjelaskan mengenai kajian pustaka, pemilihan variabel, dan metode analisis. Dalam bab ini diuraikan berbagai indikator penting yang digunakan dalam membandingkan berbagai potensi yang dimiliki suatu daerah pada tingkat provinsi, variabel-variabel yang diasumsikan mewakili keseluruhan potensi tingkat hidup suatu provinsi, dan metode-metode analisis yang digunakan dalam mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai. Bab III merupakan bab hasil dan pembahasan yang memuat analisis deskriptif maupun analisis dengan Metode Taksonomik. Bab ini akan menjelaskan keterkaitan antar variabel/indikator terpilih secara terpisah satu sama lain, kemudian dilanjutkan dengan analisis secara menyeluruh. Bab ini juga menentukan hasil peringkat tingkat hidup antar provinsi dan kesesuaian peringkat tingkat hidup antar provinsi dengan peringkat PDRB perkapita antar provinsi. Sedangkan Bab IV merupakan bab penutup yang akan meringkas berbagai temuan-temuan penting dan konsekuensi yang dimungkinkan dengan penerapan metode yang digunakan.



## BAB II

### METODOLOGI PENGHITUNGAN

### INDEKS DISPARITAS TINGKAT HIDUP ANTAR PROVINSI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Untuk menilai hasil pencapaian suatu daerah dalam hal pembangunan manusia salah satunya dapat dilakukan dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*), yaitu suatu ukuran komposit yang mencerminkan tingkat pendapatan, harapan hidup, dan pencapaian di bidang pendidikan. Dalam proses penghitungannya HDI disusun berdasarkan tiga komponen, yaitu: lamanya hidup (*longevity*) yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth/e<sub>0</sub>*); tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*); dan tingkat kehidupan yang layak, yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (*adjusted real per capita expenditure*). Saat ini HDI telah dihitung tidak hanya sampai tingkat provinsi tetapi juga sampai tingkat kabupaten/kota. Ukuran ini digunakan pula sebagai ringkasan yang dapat menggambarkan perbedaan potensi sumberdaya manusia yang dimiliki suatu daerah, baik antar tingkat provinsi maupun antar tingkat kabupaten/kota (BPS, 2001a).

Selain HDI, untuk menilai hasil pembangunan manusia juga digunakan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index/HPI*), yaitu indeks komposit yang mengukur ketertinggalan (*deprivasi*) pembangunan suatu wilayah. HPI menggabungkan beberapa dimensi kemiskinan manusia yang dipertimbangkan sebagai indikator paling mendasar dari ketertinggalan manusia, yaitu harapan seseorang tidak mencapai usia lanjut, ketertinggalan akan pengetahuan, dan ketertinggalan sarana umum. Indikator pertama diukur dengan probabilitas penduduk tidak berharap bertahan hidup sampai usia 40 tahun. Penghitungan indikator ini mengikuti metode penghitungan angka harapan hidup untuk pengukuran HDI. Indikator kedua diukur melalui angka buta huruf orang dewasa. Indikator ini dihitung berdasarkan data SUPAS 1995 dan SUSENAS 1996 dan mencakup penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara ketertinggalan sarana umum diukur dengan : (1) persentase penduduk tanpa akses ketersediaan air bersih, yang didefinisikan sebagai persentase penduduk yang menggunakan sumber air selain air ledeng, pompa air, sumur terlindung (kincir air) yang berlokasi 10 meter atau lebih dari tempat pembuangan kotoran/tinja; (2) persentase penduduk tanpa

akses ke pelayanan kesehatan, yang didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bertempat tinggal pada lokasi 5 km atau lebih dari fasilitas kesehatan; dan (3) persentase anak berusia kurang dari 5 tahun dengan status gizi kurang, yang didefinisikan sebagai persentase anak yang berusia kurang dari lima tahun yang memiliki kategori status gizi rendah dan menengah. Kekurangan gizi sedang merujuk pada persentase anak berusia dibawah lima tahun yang memiliki berat badan di bawah dua standar deviasi dari median berat badan anak berusia tersebut. Kekurangan gizi parah merujuk pada persentase anak berusia dibawah lima tahun yang berada dibawah tiga standar deviasi dari median berat badan anak berusia tersebut.

Angka kemiskinan juga merupakan indikator pencapaian pembangunan suatu wilayah. Metode BPS (BPS, 1999b) secara umum “mengukur kemiskinan absolut”, yaitu dengan menghitung jumlah penduduk miskin yang memiliki pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat mendasar, yang meliputi kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan makanan. Kriteria batas kecukupan makanan dan bukan makanan ditentukan sebagai berikut:

- a. Batas kecukupan makanan (beras, umbi-umbian, ikan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya) disetarakan dengan nilai rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi 2100 kalori per kapita per hari sesuai dengan pola konsumsi penduduk kelas marginal.
- b. Batas kecukupan bukan makanan disetarakan dengan nilai rupiah minimum per kapita per bulan yang harus dikeluarkan oleh penduduk kelas marginal untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya.

Metode pengukuran tingkat kemiskinan absolut telah mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan, dimulai pada sebelum tahun 1990 sampai dengan keadaan terakhir pada tahun 1999 (BPS, 1999c). Selain memfokuskan pada kajian tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, seperti yang diukur dengan *head-count ratio* ( $P_0$ ), analisis kemiskinan absolut perlu dilengkapi dengan ukuran-ukuran lain, seperti tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*,  $P_1$ ) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*,  $P_2$ ). Indeks-indeks ini pada dasarnya diturunkan dari apa yang disebut dengan “*a class of additively decomposable measures*”, seperti diformulasikan oleh Foster, Greer dan Thorbecke (1984), yang biasa disebut *FGT index*.

Sumber data utama yang digunakan dalam pengukuran tingkat kemiskinan nasional dan provinsi adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi yang dilaksanakan sekali dalam 3 tahun, yaitu antara lain pada tahun 1990, 1993, 1996, dan 1999. Data pendukung adalah hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) untuk menentukan jenis barang dan jasa non makanan yang termasuk dalam kebutuhan dasar penduduk. Penghitungan angka kemiskinan di tiap-tiap Provinsi dilakukan terpisah, yang dibedakan menurut kelompok perkotaan, perdesaan, dan total (perkotaan+perdesaan). Penghitungan angka kemiskinan secara nasional dilakukan secara terpisah dari penghitungan angka kemiskinan provinsi. Jadi, jumlah penduduk miskin nasional bukan merupakan kumulatif dari jumlah penduduk miskin dari semua provinsi di Indonesia.

Angka kemiskinan yang tersedia sejak tahun 1976 sampai dengan 1999 hanya memberikan perkiraan jumlah penduduk miskin secara makro yaitu hanya pada tingkat nasional dan provinsi yang masing-masing dibedakan untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Sementara data jumlah dan keberadaan penduduk miskin pada tingkat wilayah administrasi terkecil, misalnya desa tidak dapat diketahui. Salah satu penghitungan data kemiskinan mikro dilakukan oleh BKKBN berdasarkan persentase keluarga “prasejahtera” dan “sejahtera I” sebagai hasil pendataan keluarga oleh BKKBN (disebut mikro karena hasil pendataan secara lengkap). Data keluarga-keluarga miskin ini digunakan sebagai target program untuk penyaluran berbagai program pengentasan kemiskinan dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Namun demikian, pendekatan BKKBN yang menggunakan lima indikator penentuan “prasejahtera” dan “sejahtera I” dalam pengukuran data kemiskinan mikro ini telah mendapat tanggapan dari Puguh dkk. (2000) serta Ritonga dan Betke (2002) atas kelemahannya, baik dalam pengumpulan data di lapangan maupun dalam penentuan kriteria rumah tangga miskin yang kurang realistis.

Data Susenas memiliki potensi yang sangat besar untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Data Susenas Kor yang dikumpulkan setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memonitor hal-hal yang mungkin berubah tiap tahun, berguna untuk perencanaan jangka pendek, serta pertanyaan yang dapat dikaitkan dengan pertanyaan modul, misalnya pengeluaran. Hasil pengolahan Data Susenas Kor ini setiap tahunnya dipublikasikan dalam buku “Statistik Kesejahteraan Rakyat” yang memuat berbagai indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat antar provinsi. Misalnya untuk

menggambarkan keadaan berbagai komponen kesejahteraan dapat disusun berbagai data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, persentase akseptor KB, rata-rata umur perkawinan pertama, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas kesehatan, persentase balita yang diimunisasi dan diberi ASI, persentase rumah tangga yang memperoleh air bersih atau memiliki WC dengan tangki septik, dan rata-rata pengeluaran perkapita.

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks. Dalam publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat, 1988”, misalnya, kesejahteraan diamati dari berbagai aspek spesifik, yaitu: kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, perumahan, dan sosial budaya. Setiap aspek disajikan dalam indikator-indikator yang dibuat secara terpisah menurut daerah provinsi dan nasional, dan beberapa diantaranya dibedakan menurut desa maupun perkotaan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah :

- a. *Indikator Kependudukan* yang mencakup beberapa variabel, yaitu: banyaknya penduduk, laju pertumbuhan penduduk, proporsi luas wilayah terhadap Indonesia, kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, persentase penduduk kota, persentase penduduk menurut kelompok umur dan karakteristik kesejahteraan seperti penghasilan, konsumsi makanan, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pekerjaan, rasa aman dari tindak gangguan keamanan, kemudahan mendapat pelayanan kesehatan, kemudahan mendapat obat-obatan, kemudahan mendapat fasilitas pendidikan formal, kemudahan mendapat fasilitas transportasi, kemudahan mendengarkan radio, kemudahan menonton televisi, kemudahan mendapat bacaan, kemudahan mendapat pekerjaan formal dan kemudahan dalam melakukan olahraga.
- b. *Indikator Kesehatan dan Gizi* yang mencakup beberapa variabel, yaitu: angka kematian bayi, angka harapan hidup, persalinan ditolong dokter/bidan, balita berstatus gizi baik, cakupan imunisasi anak umur 1-4 tahun, keluhan kesehatan, dan jumlah bidan yang diangkat di desa.
- c. *Indikator Pendidikan* yang mencakup beberapa variabel, yaitu: angka melek huruf usia 15 tahun keatas, pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 10 tahun ke atas, rasio murid guru, rasio murid kelas, rata-rata lamanya sekolah, dan angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan.

- d. *Indikator Ketenagakerjaan* yang mencakup beberapa variabel, yaitu: tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase pekerja di sektor non pertanian.
- e. *Indikator Pendapatan dan Konsumsi* yang mencakup beberapa variabel, yaitu: persentase konsumsi makanan, persentase konsumsi bukan makanan, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan (dalam rupiah), distribusi pembagian pengeluaran (40 % rendah, 40 % sedang, dan 20 % tinggi), dan koefisien Gini.
- f. *Indikator Perumahan dan Lingkungan* yang mencakup beberapa variabel, yaitu: rumahtangga pemakai listrik, rumahtangga dengan sumber air minum ledeng, rumahtangga dengan sumber air minum bersih, rumahtangga dengan dinding tembok atau kayu, dan rumahtangga dengan luas lantai kurang dari 50 m<sup>2</sup>.
- g. *Indikator Sosial Budaya* yang mencakup beberapa variabel, yaitu: mendengarkan radio, menonton TV, dan membaca surat kabar.

## 2.2 Pemilihan Variabel

Untuk menggambarkan tingkat hidup suatu wilayah, dalam hal ini tingkat provinsi, disadari ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam tulisan ini hanya mungkin diupayakan suatu indikator yang diharapkan dapat memberikan gambaran potensi suatu daerah mendekati keadaan yang sebenarnya. Untuk ketajaman analisis, sangat dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam pemilihan variabel-variabel yang digunakan. Pemilihan variabel ini membutuhkan dukungan teoritis dan hipotesa yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan dapat diterima secara rasional, disamping ketersediaan datanya. Penilaian yang akan diterapkan tidak saja melihat keberadaan/ ketersediaan suatu fasilitas fisik suatu daerah, tetapi juga perlu mengamati kualitas dan pemberdayaan suatu fasilitas fisik tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan. Faktor non fisik pun turut dipertimbangkan asalkan dapat diidentifikasi dan dikonversikan ke dalam suatu ukuran tertentu. Jika diringkas, variabel tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu: perekonomian daerah, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumahtangga, perumahan, dan sosial budaya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraikan beberapa variabel yang dihipotesiskan mempengaruhi tingkat hidup suatu provinsi dan kemungkinan turut berperan dalam menentukan potensi suatu daerah:

#### a. Perekonomian Daerah

Faktor pertama yang dapat dijadikan sebagai ukuran tingkat perekonomian suatu daerah adalah Produk Domesik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Selama ini BPS telah menghitung Produk Domesik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi yang dihitung secara tahunan maupun triwulanan. Baik PDB maupun PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi di suatu daerah yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Semakin besar nilai ukuran ini maka semakin tinggi pencapaian tingkat perekonomian di suatu daerah, dan ukuran ini menentukan tingkat perekonomian suatu daerah dibanding daerah lain. Perlu pula dipertimbangkan apakah sebaiknya digunakan nilai PDRB Agregat atau PDRB Perkapita, sehingga dapat menggambarkan potensi wilayah sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

PDRB menurut sektor dapat pula dimanfaatkan dalam menghitung “tingkat produktivitas setiap sektor” di suatu daerah. Tingkat produktivitas setiap sektor dapat dihitung dengan membagi nilai output suatu sektor dengan jumlah tenaga kerja di sektor yang sama. Lapangan pekerjaan yang ada dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu padat karya (*labor intensive*) maupun padat modal (*capital intensive*). Beberapa provinsi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan dibangunnya pabrik-pabrik yang berskala besar oleh investor-investor, kebanyakan dari pabrik-pabrik ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Penyediaan lapangan kerja di sektor manufaktur ini tentu saja akan mengangkat taraf hidup masyarakat sekitarnya dan mempunyai dampak positif bagi sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti jasa angkutan, perdagangan, jasa perusahaan, dan lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat yang meningkat ini dihipotesiskan sebagai ukuran dalam menentukan tingkat perekonomian suatu daerah.

Tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat pula dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Pola konsumsi masyarakat ini dapat didekati dari rata-rata konsumsi perkapita untuk energi (kalori) dan protein. Semakin tinggi nilai pengeluaran suatu rumah tangga dapat diasumsikan sebagai peningkatan pendapatan dari rumah tangga tersebut, karena tidak mungkin suatu pengeluaran dilakukan tanpa ada sumber pendanaannya. Cara ini dianggap sebagai salah satu cara pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) dalam memperkirakan rata-rata pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan hukum *Engel*, semakin miskin seseorang maka akan semakin tinggi proporsi pengeluaran terhadap makanan. Oleh karena itu, pola konsumsi dapat digunakan sebagai ukuran tingkat perekonomian suatu daerah.

Indikator lain yang dapat digunakan dalam menilai perekonomian suatu daerah secara menyeluruh adalah jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin di suatu daerah. Keberadaan penduduk miskin di suatu daerah dapat pula sebagai akibat dari proses pembangunan di suatu daerah. Mereka yang tidak mampu mengikuti perkembangan pembangunan di segala bidang akhirnya terhempas dan tersisihkan. Mereka yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai keahlian apapun tersisihkan dari lapangan pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Semakin baik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh di suatu daerah akan menciptakan suatu kondisi kondusif di segala bidang kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ini dapat dijadikan sebagai salah satu variabel dalam menggambarkan tingkat hidup di suatu daerah.

#### **b. Kependudukan**

Kondisi kesejahteraan suatu wilayah juga berkaitan dengan masalah kependudukan. Semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah maka semakin besar pula beban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan dan kebutuhan penduduk tersebut. Ada banyak persoalan kependudukan yang mengemuka akhir-akhir ini dimana pemerintah daerah harus cepat tanggap mengatasinya. Sebagai contoh, pemerintah daerah dalam koridor otonomi daerah diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduknya sehingga dapat mengurangi migrasi ke daerah lain. Tentu masih banyak faktor lain yang harus dibenahi sehingga penataan masalah kependudukan ini menjadi faktor penting dalam menggambarkan keberhasilan suatu pemerintah daerah, terutama bagi mereka yang berdomisili di daerah perkotaan. Suatu desa dikelompokkan sebagai daerah perkotaan (BPS, 2000b) jika memiliki “total skor berjumlah 10 atau lebih”. Akan tetapi selain ukuran jumlah penduduk ini masih perlu pula diperhatikan beberapa ukuran lain sebagai filter, seperti proporsi luas wilayah terhadap Indonesia, kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, dan persentase penduduk perkotaan.

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk tidak

produktif (berumur muda dan lanjut usia). Pengelompokan umur penduduk produktif yang biasanya digunakan adalah 15-64 tahun dan ukuran yang digunakan adalah angka beban tanggungan (*dependency ratio*). Ukuran ini akan menggambarkan secara rata-rata banyaknya penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk produktif. Sebagai contoh, pada tahun 1990 diperoleh angka beban tanggungan sebesar 67,8 artinya setiap 100 penduduk produktif secara ekonomi harus menanggung beban kebutuhan 68 penduduk tidak produktif. Semakin rendah angka beban tanggungan diharapkan akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sebagai akibat dari semakin kecilnya beban biaya yang harus ditanggung oleh komunitas suatu masyarakat pada tingkat pendapatan/penghasilan tertentu. Oleh karena itu angka beban tanggungan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat hidup antar provinsi.

Salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi proses demografi adalah kelahiran (*fertilitas*). Ada beberapa ukuran yang dipakai untuk mengetahui tingkat fertilitas, antara lain angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate=CBR*), angka fertilitas umum (*General Fertility Rate=GFR*), angka reproduksi bruto (*Gross Reproduction Rate=GRR*), angka reproduksi neto (*Net Reproduction Rate=NRR*), angka kelahiran menurut umur (*Age Specific Fertility Rate=ASFR*), angka kelahiran total (*Total Fertility Rate=TFR*), Rasio Anak-Ibu (*Child Woman Ratio=CWR*), dan paritas/jumlah anak yang dilahirkan hidup/ALH (*Children Ever Born=CEB*). Untuk kebutuhan analisis dapat pula digunakan ukuran fertilitas secara umum, yaitu angka kelahiran kasar dan angka kelahiran total. Kedua ukuran fertilitas ini diharapkan mampu mewakili gambaran umum tingkat kelahiran di suatu provinsi dan keterbandingan antar wilayah suatu provinsi dengan provinsi lainnya.

Indikator lain yang juga dapat menggambarkan tingkat fertilitas adalah rata-rata umur perkawinan pertama (*Singulate Mean Age of Marriage=SMAM*). Semakin muda seseorang melakukan perkawinan semakin panjang masa reproduksinya, sehingga semakin besar peluang untuk melahirkan anak. Karena resiko melahirkan hanya pada wanita, maka SMAM lebih sering digunakan untuk menghitung rata-rata umur perkawinan pertama wanita. Penundaan usia perkawinan pertama wanita cenderung lebih banyak terjadi di perkotaan dibandingkan di perdesaan karena banyak diantara mereka yang berstatus sebagai wanita karier sebelum memutuskan memasuki jenjang perkawinan. Selain menurunkan tingkat fertilitas, penundaan usia perkawinan pertama wanita juga berdampak terhadap tingkat kesejahteraan rumahtangganya kelak. Banyak kasus khususnya di perkotaan wanita tidak



hanya berperan sebagai ibu rumah tangga tetapi juga turut membantu memperoleh penghasilan rumah tangganya. Wanita yang relatif berusia muda pada saat memasuki jenjang perkawinan dapat pula mempengaruhi kemampuannya dalam menghadapi berbagai kemelut di rumah tangganya terutama dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya.

### c. Kesehatan

Kualitas penduduk, secara fisik khususnya, dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain derajat kesehatan, aspek penting lain dari kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain dapat diukur dari angka kesakitan. Beberapa ukuran yang dapat dipakai antara lain angka harapan hidup (*life expectancy*), angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate=IMR*), angka kematian kasar (*Crude Death Rate=CDR*), persentase persalinan yang ditolong dokter/bidan, dan persentase Balita yang berstatus gizi baik.

Salah satu keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan di bidang kesehatan adalah meningkatnya umur harapan hidup. Peningkatan tersebut terjadi dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan, dan lingkungan. Angka harapan hidup secara konsepsi diartikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan harapan tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu daerah menggambarkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya secara umum. Indikator ini memungkinkan dipakai sebagai acuan dalam melihat keterbandingan tingkat hidup antar provinsi secara menyeluruh.

Indikator lain yang menggambarkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, adalah angka kematian bayi (*infant mortality rate*). Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal sebelum berumur 1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada jangka waktu tertentu (biasanya dihitung dalam setahun). Banyak ahli masih mempertanyakan mengenai faktor yang mungkin mempengaruhi tingginya tingkat kematian bayi, walaupun disadari bahwa kematian itu sendiri tidak ditentukan oleh kekuasaan manusia. Beberapa hasil studi yang dapat dilihat menunjukkan bahwa tingginya tingkat kematian bayi berkaitan dengan faktor sosial ekonomi dan kemajuan dalam cara pengobatan (*medical advances*). Disamping itu faktor demografi ikut berpengaruh terhadap tingkat kematian bayi. Caldwell (1983) berpendapat bahwa “pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh

terhadap penurunan *mortality* berdasarkan hasil studinya dari data Nigeria”. Dia mencoba membedakan pengaruh sosial ekonomi dan *medical technology* terhadap penurunan mortalitas. Faktor sosial ekonomi meliputi perbaikan dalam status nutrisi, perumahan dan pakaian (*clothing*), secara lebih luas dikatakan sebagai *standards of living* atau secara lebih jelas ditunjukkan sebagai pembangunan ekonomi (*economic development*).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dapat pula dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Pelayanan kesehatan, disamping dukungan fasilitas dan sarana kesehatan, akan terlaksana dengan baik apabila didukung pula oleh tersedianya petugas atau tenaga kesehatan yang cukup sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi adalah pelayanan proses persalinan. Keberhasilan proses persalinan sangat tergantung kepada petugas atau tenaga penolong yang menanganinya. Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh dokter atau bidan. Oleh karena itu, data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Masa balita adalah masa yang penting dalam siklus kehidupan manusia karena merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan. Kesehatan dan gizi pada masa balita akan menentukan kesehatan, intelektualitas, prestasi, dan produktivitasnya di kemudian hari. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penduduk sebaiknya dilakukan sedini mungkin, yaitu dengan memberikan perhatian pada status kesehatan balita. Survei 100 Desa (BPS, 1999a) yang diselenggarakan BPS kerjasama UNICEF menunjukkan bahwa secara keseluruhan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) selama 1997-1998 naik dari 5,8 persen menjadi 7,5 persen. Kenaikan kasus ini mencolok untuk bayi dari rumah tangga kelompok 40 persen pendapatan terendah.

#### **d. Pendidikan**

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep “link and match”, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dikatakan berkualitas bila menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan

perkembangan jaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sektor pendidikan seharusnya mendapatkan perhatian terbesar baik dari sisi program maupun pendanaan dalam upaya mempersiapkan sumberdaya manusia bagi kelanjutan pembangunan nasional. Beberapa indikator pendidikan yang dapat digunakan antara lain angka melek huruf, angka putus sekolah, jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lamanya sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, rasio murid guru, dan rasio murid kelas.

Pada tingkat makro ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah angka melek huruf penduduk dewasa. Melek huruf adalah kemampuan bisa membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dari aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Dalam publikasi ini persentase melek huruf menggunakan batasan umur 15 tahun keatas. Indikator ini menjadi salah satu indikator pendidikan yang dapat digunakan dalam membandingkan kesempatan dan kualitas pendidikan antar daerah. Dalam salah satu tulisan disimpulkan bahwa faktor yang paling kuat mempengaruhi harapan hidup adalah melek huruf (Sagan, 1992).

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berusia 10 tahun ke atas merupakan indikator pendidikan yang penting dalam melihat potensi sumberdaya manusia (SDM) di suatu daerah sekaligus mengantisipasi ketersediaan tenaga kerja yang memadai sesuai kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif. Dapat diterima secara akal sehat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula standar pendapatan yang diperoleh terutama jika lapangan kerja yang ditekuni sesuai dengan bidang ilmu/keahlian yang dimiliki. Tanpa disadari ketidaksesuaian antara kedua hal ini masih sering ditemui di lapangan karena tidak adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ada daerah yang memiliki SDM dengan keahlian tertentu yang terpaksa bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak sesuai. Sebaliknya, kebutuhan tenaga kerja yang memadai bagi industrialisasi yang menciptakan lapangan pekerjaan melalui pembangunan pabrik-pabrik berskala besar dan penerapan teknologi tinggi di suatu daerah tidak mampu dicukupi oleh SDM dari daerah tersebut. Tidak jarang hal inipun mengundang konflik sosial di tengah masyarakat karena pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang memadai tersebut ditempati oleh pencari kerja yang datang dari luar daerah.

Sebagai patokan dasar untuk membandingkan kualitas SDM antar daerah dapat digunakan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Umum dan sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat, Diploma I/II, Akademi/Diploma III, dan Diploma IV/Universitas. Sebuah hipotesa (Sagan, 1992) juga mengemukakan bahwa “tingkat pendidikan menciptakan keuntungan-keuntungan melalui peningkatan penge-tahuan kesehatan dan sikap hidup sehat”.

Secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah (tahun). Indikator ini dapat menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk dewasa. Penghitungan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*=MYS) dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung (BPS, 2001b) dengan memanfaatkan salah satu jawaban isian pertanyaan Susenas Kor. Cara penghitungannya menggunakan rata-rata tertimbang dari variabel tersebut dengan memberikan bobot yang sesuai. Indikator ini lebih memadai untuk digunakan dalam berbagai analisis karena merupakan data rasio. Oleh karena itu, indikator ini dapat pula digunakan dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan antar daerah.

Untuk melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dapat digunakan indikator angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi sekolah (APS). Masing-masing indikator ini dihitung untuk tiap jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun), SLTP (usia 13-15 tahun), dan SLTA (usia 16-18 tahun). APK mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini (*bisa lebih besar dari 100*) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Nilai APM yang mendekati 100 persen menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan tepat waktu sesuai dengan usia sekolah jenjang pendidikannya. Sedangkan APS mengukur proporsi anak yang masih bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Penghitungan ketiga indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah ini

pada suatu jenjang pendidikan tertentu (BPS, 2001b) akan digunakan pula dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan antar daerah.

Proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung apabila ada dua komponen penting yaitu murid dan tenaga pengajar serta didukung oleh beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ketersediaan dan penempatan tenaga pengajar ini seringkali menjadi polemik yang berkepanjangan di daerah karena tidak adanya dukungan sarana dan prasarana baik secara fisik maupun non fisik. Banyak tenaga pengajar tidak bersedia ditempatkan mengajar ke daerah-daerah terpencil karena mereka merasa tidak memperoleh jaminan kesejahteraan hidupnya dan faktor penunjang lainnya. Sejauh mana ketercukupan tenaga pengajar ini dibandingkan jumlah murid di suatu sekolah dapat dilihat melalui suatu indikator yang dinamakan rasio murid guru. Rasio Murid-Guru memperlihatkan beban guru, yaitu rata-rata banyaknya murid yang berada di bawah pengawasan seorang guru. Jika indikator ini mengalami peningkatan dapat diartikan bahwa penambahan jumlah murid tidak diimbangi dengan penambahan guru. Berkaitan dengan pembangunan sektor pendidikan antar daerah maka indikator ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah suatu daerah membenahi sektor ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Disadari bahwa kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan melalui proses pendidikan, disamping tergantung kepada ketersediaan sarana dan prasarana fisik, juga sangat ditentukan oleh tersedianya tenaga pengajar dalam jumlah cukup dan kualitas yang memadai.

Indikator lain yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan di suatu daerah adalah rasio murid kelas. Rasio Murid-Kelas ini menunjukkan kepadatan setiap ruangan kelas yaitu rata-rata banyaknya murid yang belajar pada setiap ruangan kelas. Jika indikator ini mengalami peningkatan dapat diartikan bahwa penambahan jumlah murid tidak diimbangi dengan penyediaan sarana pendidikan berupa ruangan kelas. Berkaitan dengan pembangunan sektor pendidikan antar daerah maka indikator ini dapat pula digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah suatu daerah membenahi sektor ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

#### **e. Ketenagakerjaan**

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Indikator ketenagakerjaan, misalnya, dapat memberikan gambaran tentang daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan dan

produktivitas tenaga kerja. Apabila perekonomian kurang dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat memicu timbulnya masalah-masalah sosial.

Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, indikator ketenagakerjaan juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut wilayah dan sektor, yang tentunya berguna bagi para investor untuk strategi investasi dan bagi pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia. Beberapa indikator yang akan dipertimbangkan dalam analisis ini antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Pengangguran Terdidik (TPT<sub>d</sub>), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan Kontribusi Sektor dalam Penyerapan Tenaga Kerja. Pendekatan teori ketenagakerjaan (BPS, 2001b) yang digunakan dalam penghitungan indikator-indikator tersebut menggunakan konsep dasar angkatan kerja (*Standard Labor Force Concept*). Penghitungan indikator ketenagakerjaan ini akan digunakan pula dalam menilai keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan antar daerah. Analisis ketenagakerjaan ini akan disertakan pula dalam membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengukur proporsi penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan (kedua komponen ini disebut angkatan kerja) dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Misalnya, hasil penghitungan mendapatkan “angka TPAK Indonesia sebesar 67,22 persen” (BPS, 2001b) artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 67 orang diantaranya yang termasuk ke dalam angkatan kerja atau diartikan hanya sekitar 67 persen penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK suatu provinsi akan memberikan gambaran potensi tenaga kerja di wilayahnya. Ukuran ini akan digunakan pula untuk membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Tingkat Pengangguran Terbuka mengukur proporsi penduduk yang mencari pekerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Misalnya, hasil penghitungan memperoleh “angka TPT Indonesia sebesar 5,5 persen” (BPS, 2001b) artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5-6 orang diantaranya adalah pencari kerja (pengangguran). Masalah pengangguran ini sangat berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Tentu perlu ditinjau secara seksama berbagai latar belakang yang mendasarinya, misalnya, apakah karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau tidak tersedianya tenaga kerja yang

sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Dalam teori ekonomi makro dikenal *Kurva Phillips* (Dornbusch dan Fischer, 1991) yang menggambarkan keterkaitan antara inflasi dan tingkat pengangguran: “Semakin tinggi tingkat pengangguran, akan semakin rendah laju inflasi”. Jadi, ditinjau dari luas cakupannya maka ukuran ini dapat digunakan dalam menilai berbagai kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.

Tingkat Pengangguran Terdidik mengukur proporsi penduduk berpendidikan SLTA ke atas (sebagai kelompok terdidik) yang mencari pekerjaan dibandingkan dengan besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut. Misalnya, hasil penghitungan memperoleh angka  $TPT_d$  Indonesia sebesar 13,06 persen artinya dari 100 orang angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas, secara rata-rata terdapat sekitar 13 orang yang sedang mencari kerja. Indikator ini dapat menggambarkan secara umum ketersediaan lapangan kerja bagi para tenaga kerja terdidik. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan hal ini untuk mengantisipasi peningkatan jumlah tenaga kerja terdidik ini dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan yang kondusif bagi para investor dalam membuka lapangan pekerjaan yang sesuai. Jika kondisi ini terpenuhi maka angka  $TPT_d$  ini akan semakin menurun dan ini dapat mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Pertimbangan inilah yang mendukung dipilihnya indikator ini dalam membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Pengertian kesempatan kerja adalah banyaknya penduduk usia kerja yang terserap dalam pasar kerja, atau penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja. Tingkat Kesempatan Kerja mengukur proporsi penduduk yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jadi, Tingkat Kesempatan Kerja ini merupakan komplemen dari Tingkat Pengangguran Terbuka. Misalnya, uraian di atas mendapatkan angka  $TPT$  Indonesia sebesar 5,5 persen maka angka  $TKK$  menjadi 94,5 persen. Artinya tingkat kesempatan kerja yang tersedia sebesar 94,5 persen atau dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja, secara rata-rata 94-95 orang diantaranya sudah bekerja.

Perubahan kontribusi sektor dalam penyerapan tenaga kerja dalam suatu kurun waktu tertentu memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian suatu daerah. Dalam hal ini perubahan kontribusi sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja sering dijadikan indikator untuk menilai perubahan struktur perekonomian daerah. Ini disebabkan sektor industri pada umumnya mempunyai produktivitas dan tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Sebaliknya, tingginya kontribusi

sektor pertanian merefleksikan masih “tradisional”nya struktur perekonomian suatu daerah. Indikator yang digunakan untuk mengetahui andil setiap sektor dalam penyerapan tenaga kerja dibedakan atas tiga kelompok sektor, yaitu sektor primer (pertanian), sektor sekunder (pertambangan, industri, listrik, gas dan air, serta bangunan, dan sektor tersier (perdagangan, angkutan, keuangan, jasa, dan lainnya). Kontribusi sektor primer/*Agriculture* (A) mengukur proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja. Kontribusi sektor sekunder/*Manufacture* (M) mengukur proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, serta bangunan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja. Sedangkan kontribusi sektor tersier/*Service* (S) mengukur proporsi penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, angkutan, keuangan, jasa, dan lainnya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja. Kontribusi ketiga sektor tersebut (BPS, 2001b) di Indonesia, berturut-turut, sebesar “43,21 persen, 17, 84 persen, dan 38,95 persen”.

#### **f. Pendapatan dan Konsumsi**

Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga, maka pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan cenderung akan semakin besar, karena seluruh kebutuhan untuk konsumsi makanan sudah terpenuhi. Demikian pula sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi suatu masyarakat dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Selain itu, data Susenas juga berguna untuk bahan penelitian hukum ekonomi (BPS, 2000a) yang menyatakan bahwa “bila selera tidak berbeda, maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya tingkat pendapatan” (*Ernest Engel, 1857*).

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, “pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai petunjuk



perubahan tingkat kesejahteraan” (BPS, 1999a). Oleh karena itu persentase rata-rata konsumsi makanan per kapita per bulan dipertimbangkan sebagai salah satu variabel dalam menentukan dan membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan juga merupakan hal yang penting diperhatikan. Ketimpangan dalam hal pemerataan pendapatan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial antar kelompok penduduk. Ada dua indikator utama yang digunakan untuk memberikan gambaran tingkat ketimpangan pembagian pendapatan, yaitu Kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini (*Gini Ratio*). Indikator pertama mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia (BPS, 1999a) terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

- a. Tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi jika memperoleh kurang dari 12 persen.
- b. Tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang jika memperoleh antara 12-17 persen.
- c. Tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah jika memperoleh lebih dari 17 persen.

Data pengeluaran digunakan sebagai proxy data pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, paling tidak indikator yang diperoleh dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah perkembangan yang terjadi.

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks Gini (BPS, 1999b) menggunakan tabel frekuensi penduduk yang dibagi ke dalam beberapa golongan pengeluaran perkapita. Kemudian untuk masing-masing golongan pengeluaran dihitung frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran penduduk. Indeks Gini yang diperoleh juga dihitung berdasarkan data pengeluaran. Semakin besar angka ini (besarnya antara 0 dan 1) berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini

bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Indikator ini bersifat makro sehingga dipilih sebagai salah satu ukuran dalam menentukan dan membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

#### **g. Perumahan dan Lingkungan**

Secara umum, kualitas rumah tempat tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan sebagai cerminan nyata dari tingkat kesejahteraan penghuninya. Demikian pula aspek kesehatan dan kenyamanan dan juga aspek estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah dan umumnya berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah, fasilitas yang tersedia dan digunakan di dalam rumah turut menggambarkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Meskipun dalam beberapa kasus, terutama di daerah pedesaan, masih ditemukan beberapa rumahtangga yang memiliki kualitas dan fasilitas rumah yang memadai sebagai warisan turun temurun dari keluarga namun mereka termasuk dalam kelompok penduduk miskin. Akan tetapi patut dipertimbangkan secara umum bahwa kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan sekaligus dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan bagi penghuninya.

Beberapa indikator kualitas perumahan yang biasanya digunakan adalah luas lantai, jenis lantai terluas, jenis atap terluas, dan jenis dinding terluas. Indikator rata-rata luas lantai (hunian) per rumahtangga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk di suatu wilayah. Menurut kriteria rumah sehat (BPS, 1999a) agar penghuninya dapat hidup nyaman dan tidak berdesakan maka “minimal luas lantai per anggota rumahtangga adalah 9 m<sup>2</sup>”. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan (BPS, 2001b), salah satu persyaratan rumah sehat harus memiliki “luas lantai perkapita minimal 8 m<sup>2</sup>”. Dalam analisis ini rumah sehat diartikan sebagai rumah yang memiliki luas lantai sebesar 50 m<sup>2</sup> atau lebih. Patokan ini hanya merupakan acuan dalam menilai perbedaan antar daerah, meskipun batasan yang lazim di suatu daerah berbeda-beda. Semakin besar luas lantai yang dikuasai oleh suatu rumahtangga maka semakin baik tingkat kesejahtraannya. Jadi, persentase rumahtangga dengan luas lantai kurang dari 50 m<sup>2</sup> akan digunakan dalam menentukan dan membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Jenis lantai digunakan pula sebagai ukuran dalam mencerminkan rumah sehat atau tidak. Jenis lantai terluas yang terbuat dari tanah mencirikan rumah tidak sehat dalam analisis ini. Patokan ini hanya

merupakan acuan karena pada kenyataannya hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebiasaan, khususnya di beberapa daerah pedesaan. Akan tetapi, ditinjau dari sudut ekonomi rumahtangga maka jenis lantai yang terbuat dari bukan tanah dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumahtangga atau tingkat kesejahteraannya. Semakin besar persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah maka kondisi perumahan di daerah tersebut dapat diindikasikan jelek. Indikator ini juga akan digunakan dalam menentukan dan membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Hal yang sama juga berlaku bagi penentuan jenis atap terluas dan dinding terluas suatu rumah sehat tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi saja tetapi faktor budaya, iklim, dan ketersediaan bahan baku di daerah yang bersangkutan. Jenis atap terluas yang akan dijadikan patokan dasar adalah seng, asbes, dan genteng. Penentuan atap seng, asbes, dan genteng ke dalam satu kelompok didasarkan atas pertimbangan bahwa bahan tersebut hampir sama kuatnya. Secara umum, semakin besar persentase rumahtangga yang menempati rumah beratap seng, asbes, dan genteng maka semakin baik kondisi perumahan di daerah tersebut. Sedangkan patokan dasar untuk jenis dinding terluas adalah tembok dan kayu. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menempati rumah berdinding tembok dan kayu maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumahtangganya. Jadi, kedua ukuran ini akan digunakan pula dalam menentukan dan membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah juga penting untuk memberikan kenyamanan bagi penghuninya, indikator fasilitas perumahan ini juga turut menentukan kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali oleh penghuninya adalah tersedianya listrik, air bersih, dan jamban sendiri dengan tangki septik. Penggunaan listrik, baik listrik yang dihasilkan oleh PLN maupun non PLN, sebagai alat penerangan sangat penting disamping untuk berbagai keperluan rumahtangga lainnya. Era teknologi informasi yang diwarnai dengan penggunaan komputerisasi, telekomunikasi, dan internet tidak akan berarti apa-apa jika ketersediaan fasilitas listrik ini tidak terpenuhi. Sekalipun pemerintah terus berupaya melalui program listrik masuk desa yang berkesinambungan, pemanfaatan listrik oleh rumahtangga masih merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumahtangga. Hal inilah yang menjadi dasar dipilihnya persentase rumahtangga yang menggunakan listrik sebagai alat penerangan digunakan sebagai salah satu variabel dalam menentukan dan membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Suatu rumah tangga dikatakan sudah menggunakan fasilitas air bersih jika sumber air minum rumah tangga berasal dari air dalam kemasan, leding, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung (jika merujuk kepada kuesioner Susenas Kor 2000, VSEN2000.K). Jika ingin dianalisis lebih jauh, khusus untuk sumber air minum dari pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi persyaratan jarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan kotoran/tinja terdekat. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih di suatu daerah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di suatu daerah menunjukkan semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Peningkatan tingkat kesehatan rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga dapat diartikan sebagai komponen kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu persentase rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih di suatu daerah digunakan sebagai salah satu variabel dalam menentukan dan membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

Fasilitas rumah yang lain yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pengertian tangki septik harus memenuhi standar tertentu yang terdiri dari dua tangki, yaitu tangki utama yang berfungsi sebagai penampungan kotoran/tinja dan tangki pendukung yang merupakan tempat penampungan cairan/air kotor yang telah mengalami penyaringan melalui tangki utama. Diharapkan melalui proses tersebut maka tangki septik akan memiliki daya tampung yang maksimal dan menjadikan siklus sumber resapan air tanah yang baik. Untuk memenuhi standar tangki septik memang membutuhkan jumlah biaya yang lumayan sehingga suatu rumah tangga untuk dapat memiliki tangki septik perlu dukungan kemampuan ekonomi. Hal ini menjadi pertimbangan dipilihnya persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik sebagai salah satu variabel dalam menentukan dan membandingkan tingkat hidup antar provinsi.

#### **h. Sosial Budaya**

Sosial budaya merupakan salah satu aspek kesejahteraan yang luas cakupannya. Ada beberapa aspek sosial budaya yang dapat difokuskan pada kegiatan sosial budaya yang mencerminkan aspek kesejahteraan, antara lain

akses pada informasi dan hiburan, kegiatan yang mengandung corak sosial dan budaya, perjalanan wisata, serta upaya kesejahteraan sosial. Pemanfaatan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan sosial budaya merupakan petunjuk bahwa tingkat kesejahteraan telah meningkat karena penggunaan waktu untuk kegiatan tidak mencari nafkah telah semakin banyak.

<http://www.bps.go.id>

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan akses rumahtangga pada informasi dan hiburan. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penerangan seperti stasiun penyiaran dan stasiun pemancar radio dan televisi telah memungkinkan penduduk di seluruh pelosok mengikuti acara radio dan televisi. Peningkatan kemampuan penyiaran siaran radio dan televisi pemerintah (BPS, 1999a) dapat dilihat dari kemampuan daya pancar radio dan televisi pemerintah masing-masing dari “810 KW dan 48,2 KW pada awal Pelita I menjadi 3.124,4 KW dan 348,3 KW pada awal Pelita VI”. Dari segi penyiaran, jumlah jam siaran telah meningkat dari rata-rata 8 jam sehari menjadi 21 jam siaran radio dan 12 jam siaran televisi. Aspek sosial budaya terukur dan ketersediaan data yang akan dibahas dalam analisis ini adalah persentase rumahtangga yang mendengarkan radio, persentase rumahtangga yang menonton televisi, dan persentase rumahtangga yang membaca surat kabar.

Dari uraian keseluruhan aspek kehidupan masyarakat tersebut maka variabel/indikator yang akan digunakan menentukan indeks secara menyeluruh (*composite index*) dalam publikasi ini dibatasi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Indikator Perumahan, mencakup beberapa variabel sebagai berikut:
  - a. Persentase rumahtangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah.
  - b. Persentase rumahtangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih.
  - c. Persentase rumahtangga yang memiliki lantai rumah sebagian besar dari tanah.
  - d. Persentase rumahtangga yang memiliki sendiri fasilitas buang air besar.
  - e. Persentase rumahtangga yang memiliki tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran/tinja.
2. Indikator Pendidikan, mencakup beberapa variabel sebagai berikut:
  - a. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang buta huruf.
  - b. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan diploma ke atas.
  - c. Angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun.
  - d. Angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 13-15 tahun.
  - e. Angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun.
  - f. Rasio murid terhadap guru tingkat SD.
  - g. Rasio murid terhadap guru tingkat SLTP.

- h. Rasio murid terhadap guru tingkat SLTA.
- 3. Indikator Kesehatan, mencakup beberapa variabel sebagai berikut:
  - a. Angka harapan hidup waktu lahir.
  - b. Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup).
  - c. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan yang lalu.
  - d. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan pengobatan sendiri.
  - e. Persentase balita kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga medis.
  - f. Rata-rata lamanya sakit.
- 4. Indikator Ketenagakerjaan, mencakup beberapa variabel sebagai berikut:
  - a. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja.
  - b. Pekerja yang jumlah jam kerja per minggunya < 14 jam.
  - c. Pekerja yang jumlah jam kerja per minggunya < 35 jam.
  - d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
  - e. Angka pengangguran terbuka.
  - f. Jumlah pekerja di sektor informal.
- 5. Indikator Kesenangan/Sosial Budaya, mencakup beberapa variabel sebagai berikut:
  - a. Persentase penduduk 10 tahun keatas yang menonton televisi seminggu yang lalu.
  - b. Persentase penduduk 10 tahun keatas yang mendengarkan siaran radio seminggu yang lalu.
  - c. Persentase penduduk 10 tahun keatas yang membaca surat kabar/majalah seminggu yang lalu.
  - d. Persentase penduduk 10 tahun keatas yang melakukan kegiatan olahraga seminggu yang lalu.

Untuk setiap variabel akan disajikan angka-angka menurut provinsi dan rata-rata secara nasional. Secara terpisah masing-masing kelompok variabel/indikator tersebut akan dilihat pengaruhnya secara independen terhadap tingkat hidup antar provinsi dengan mengasumsikan kondisi kelompok variabel/indikator lainnya tidak mengalami perubahan. Tahap selanjutnya akan dihitung indeks tingkat hidup antar provinsi dengan mempergunakan keseluruhan variabel/indikator tersebut secara bersamaan.

### 2.3 Metode Analisis

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah diuraikan sebelumnya maka ada dua metode yang akan digunakan dalam publikasi ini, yaitu: (1) analisis deskriptif dan (2) analisis dengan metode taksonomik. Kedua metode ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan menyeluruh mengenai indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi yang dijabarkan dalam subbab berikutnya.

### 2.3.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel maupun dalam bentuk grafik-grafik dari keseluruhan variabel/indikator. Beberapa ukuran statistik dasar (rata-rata dan standar deviasi) dari keseluruhan variabel/indikator juga disajikan dalam analisis deskriptif ini. Nilai rata-rata dan standar deviasi suatu variabel terpilih adalah rata-rata dan standar deviasi dari angka-angka provinsi untuk setiap variabel tersebut.

### 2.3.2. Metode Taksonomik

Sebelum variabel-variabel terpilih sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan sebagai komponen-komponen penyusunan indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi, maka sebagai penunjang akan dikaji terlebih dahulu secara deskriptif aspek dimensi kesejahteraan dari masing-masing variabel yang terkandung di dalamnya. Secara sederhana untuk masing-masing variabel terpilih dapat diketahui atau dihitung ukuran-ukuran statistik dasar, seperti rata-rata (*mean*), di tiap-tiap provinsi dibandingkan angka nasional yang bisa memberikan perbedaan kondisi dan keadaan antar provinsi. Untuk lebih jelas maka variabel-variabel terpilih di tiap-tiap aspek dimensi kesejahteraan untuk keseluruhan cakupan penelitian digambarkan masing-masing dengan sebuah grafik. Dari beberapa grafik ini dapat dilihat perbedaan dan peringkat antar provinsi secara terpisah berdasarkan suatu aspek dimensi kesejahteraan masyarakatnya. Analisis deskriptif dari keseluruhan variabel terpilih di suatu provinsi, disamping pertimbangan-pertimbangan secara teoritis, dapat dijadikan dasar untuk penentuan provinsi acuan.

Penyusunan Indeks Disparitas Tingkat Hidup antar provinsi dilakukan dengan Metode Taksonomik. Tujuannya adalah menentukan suatu indeks menyeluruh (*composite index*) yang didasarkan atas beberapa



variabel/indikator sosial ekonomi untuk setiap provinsi. Adapun prosedur penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama adalah membentuk matriks dasar (A) dimana baris menunjukkan provinsi yang diteliti sedangkan kolom menunjukkan sekumpulan variabel terpilih. Matriks dasar (A) tersebut adalah:

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & . & . & . & . & . & . & . & \alpha_{1m} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & . & . & . & . & . & . & . & \alpha_{2m} \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & . & . & . & . & . & . & . & \alpha_{nm} \end{bmatrix}$$

dimana:

n = provinsi = 1, 2, 3, ....., 26.

m = variabel/indikator sosial ekonomi = 1, 2, 3, ....., m.

- b. Tahap kedua adalah membuat matriks yang sudah distandardisasi dari matriks dasar sebelumnya. Karena ukuran-ukuran kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan variabel-variabel/indikator m tidak seragam, maka perlu diseragamkan (*standardization procedure*).

Rumus yang digunakan untuk menstandarisasi semua isian sel matriks dasar tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\bar{\alpha}_j &= \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_{ij}}{n} \\ \beta_j &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (\alpha_{ij} - \bar{\alpha}_j)^2} \\ \lambda_{ij} &= \frac{\alpha_{ij} - \bar{\alpha}_j}{\beta_j}\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh matriks yang sudah distandardisasi sebagai berikut:

$$A_Z = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{2m} \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{3m} \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n2} & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{nm} \end{bmatrix}$$

- c. Tahap ketiga adalah menghitung jarak antar provinsi (1, 2, 3,..., n) untuk setiap indikator dan membentuk isian-isian tersebut dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} \lambda_{11} - \lambda_{21} & \lambda_{12} - \lambda_{22} & . & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{1m} - \lambda_{2m} \\ \lambda_{11} - \lambda_{31} & \lambda_{12} - \lambda_{32} & . & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{1m} - \lambda_{3m} \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ \lambda_{21} - \lambda_{31} & \lambda_{22} - \lambda_{32} & . & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{2m} - \lambda_{3m} \\ \lambda_{21} - \lambda_{41} & \lambda_{22} - \lambda_{42} & . & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{2m} - \lambda_{4m} \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ \lambda_{9,1} - \lambda_{10,1} & \lambda_{9,2} - \lambda_{10,2} & . & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{9m} - \lambda_{10m} \\ \lambda_{9,1} - \lambda_{11,1} & \lambda_{9,2} - \lambda_{11,2} & . & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{9m} - \lambda_{11m} \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ \lambda_{(n-1)1} - \lambda_{n1} & . & . & . & . & . & . & . & . & . & \lambda_{(n-1)m} - \lambda_{nm} \end{bmatrix}$$

- d. Tahap keempat adalah membuat Matriks Jarak (*distance matrix*) yaitu matriks simetris yang merupakan hasil kali matriks jarak antar provinsi dengan matriks transposenya. Secara sederhana matriks simetris tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0 & \pi_{12} & \pi_{13} & . & . & . & . & . & . & \pi_{1n} \\ \pi_{21} & 0 & \pi_{23} & . & . & . & . & . & . & \pi_{2n} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & 0 & . & . & . & . & . & . & \pi_{3n} \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ \pi_{n1} & \pi_{n2} & \pi_{n3} & . & . & . & . & . & . & 0 \end{bmatrix}$$

dimana:

$$\begin{aligned}\pi_{ab} &= \sqrt{\sum_{k=1}^m (\lambda_{ak} - \lambda_{bk})^2} \\ \pi_{aa} &= 0 \\ \pi_{ab} &= \pi_{ba}\end{aligned}$$

- e. Tahap kelima adalah menentukan Pola Pembangunan dengan rumus sebagai berikut:

$$\pi_{io} = \sqrt{\sum_{k=1}^m (\lambda_{ik} - \lambda_{ok})^2}$$

$$i = 1, 2, \dots, 26 \quad (\text{provinsi})$$

Semakin tinggi nilai  $\pi_{io}$  maka semakin jauh jarak provinsi bersangkutan dari provinsi model (provinsi yang dijadikan acuan).

- f. Tahap keenam adalah menentukan Ukuran Pembangunan ( $\lambda_i^*$ ) yang memiliki nilai diantara nol dan satu ( $0 \leq \lambda_i^* \leq 1$ ). Jika nilai dari Ukuran Pembangunan semakin mendekati satu maka provinsi tersebut semakin tidak berkembang. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Ukuran Pembangunan ini adalah sebagai berikut:

$$\lambda_i^* = \frac{\pi_{io}}{\pi_o}$$

dimana:

$$\pi_o = \bar{\pi}_{io} + 2 \beta_{io}$$

$$\bar{\pi}_{io} = \frac{\sum_{i=1}^n \pi_{io}}{n}$$

$$\beta_{io} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\pi_{io} - \bar{\pi}_{io})^2}$$

<http://www.bps.go.id>



### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Analisis Deskriptif

Beberapa ukuran statistik dasar dari beberapa variabel yang terpilih dalam penghitungan indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi ini disajikan pada Tabel 9 (lihat lampiran). Ukuran rata-rata sederhana dan standar deviasi setiap variabel di 26 Provinsi disajikan berdasarkan kelompok indikator, yaitu (1) indikator perumahan terdiri dari 5 variabel; (2) indikator pendidikan terdiri dari 8 variabel; (3) indikator ketenagakerjaan terdiri dari 6 variabel; (4) indikator kesehatan terdiri dari 6 variabel; dan (5) indikator kesenangan/sosial budaya terdiri dari 4 variabel.

Mengamati sebaran data dari variabel-variabel dalam indikator perumahan terlihat bahwa variasi data dalam setiap variabel relatif besar. Variasi terbesar terdapat pada data persentase rumahtangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah dengan angka standar deviasi sebesar 17,9 (lihat Tabel 9, lampiran). Pola sebaran data ini dapat dilihat pula pada Tabel 2 (lampiran) dimana persentase rumahtangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah berkisar antara 34,16 persen (terkecil) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 99,86 persen (terbesar) di Provinsi DKI Jakarta.

Pada indikator pendidikan terlihat variasi data dalam tiap-tiap variabel berbeda-beda. Data yang relatif homogen ditemukan pada variabel persentase penduduk 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan diploma keatas, rasio murid guru (SLTP) dan rasio murid guru (SLTA). Sementara variasi cukup tinggi terjadi pada data angka partisipasi sekolah (16-18 tahun) dengan angka standar deviasi sebesar 10,6 (lihat Tabel 9, lampiran).

Demikian pula pada indikator ketenagakerjaan juga terlihat variasi yang berbeda-beda dalam tiap-tiap variabel. Variasi tinggi terjadi pada data persentase pekerja dengan jumlah jam kerja <35 jam per minggu dan persentase pekerja di sektor informal. Sementara pada data angka pengangguran terbuka dengan angka standar deviasi 2,3 menunjukkan bahwa data tersebut relatif homogen (lihat Tabel 9, lampiran).

Variasi yang cukup besar pada beberapa data dalam indikator kesehatan merupakan sinyal awal terjadinya disparitas di bidang kesehatan. Sebagai contoh dalam hal persentase balita kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga medis dengan angka standar deviasi yang cukup besar (17,7) menunjukkan terjadinya disparitas dalam hal persentase balita kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga medis dimana persentase terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (26,86 persen) dan persentase terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta (94,11 persen).

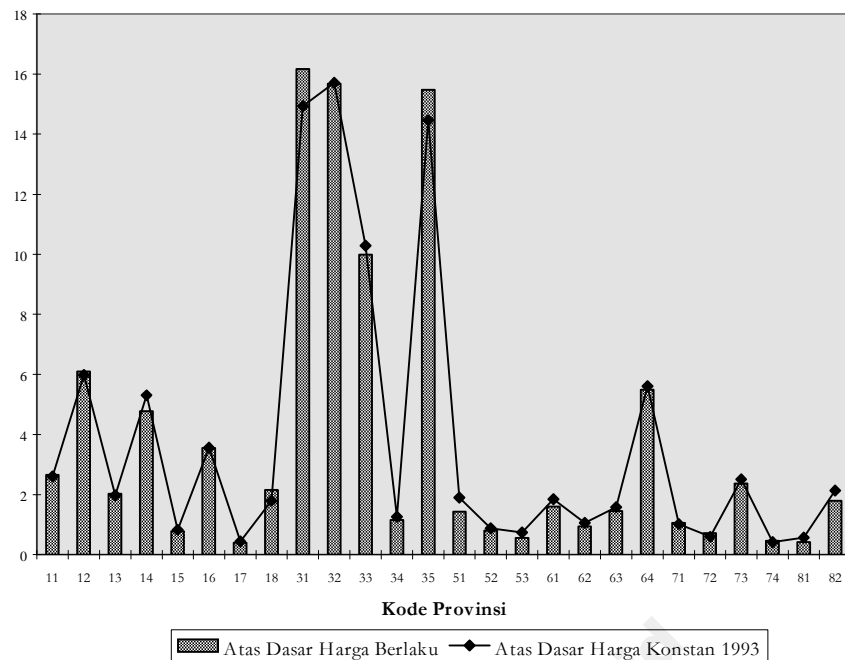
Dalam hal indikator kesenangan/sosial budaya, disparitas cenderung terjadi pada kegiatan menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca surat kabar/majalah. Hal ini ditunjukkan oleh angka standar deviasi ketiga indikator tersebut yang relatif lebih besar dibanding kegiatan olahraga. Angka standar deviasi ketiga indikator tersebut masing-masing sebesar 15,4, 12,3 dan 11,3. Sementara pada kegiatan olahraga disparitasnya relatif kecil seperti ditandai dengan angka standar deviasi sebesar 4,0 (lihat Tabel 9, lampiran).

### **3.1.1. Potensi Perekonomian Daerah.**

Langkah awal yang akan dilakukan adalah menelaah perbedaan dari aspek potensi perekonomian daerah antar provinsi berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB Nominal), nilai PDRB atas dasar harga konstan 1993 (PDRB Riil), dan nilai PDRB perkapita. Secara visual, Gambar 3.1. menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati posisi terbesar nilai PDRB Nominal pada tahun 1999, sedangkan posisi terbesar nilai PDRB Riil pada tahun yang sama ditempati oleh Provinsi Jawa Barat. Dari gambar tersebut terlihat bahwa distribusi persentase PDRB Nominal Provinsi DKI Jakarta sebesar 16,17 persen dari total kumulatif nilai PDRB Nominal 26 provinsi di seluruh Indonesia. Posisi kedua dan ketiga terbesar, berturut-turut ditempati oleh Provinsi Jawa Barat (15,68 persen) dan Provinsi Jawa Timur (15,48 persen). Sedangkan distribusi persentase PDRB Riil pada tahun 1999 Provinsi Jawa Barat sebesar 15,72 persen dari total kumulatif nilai PDRB Riil 26 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian disusul oleh Provinsi DKI Jakarta (14,94 persen) dan Provinsi Jawa Timur (14,46 persen) yang menempati posisi kedua dan ketiga terbesar.

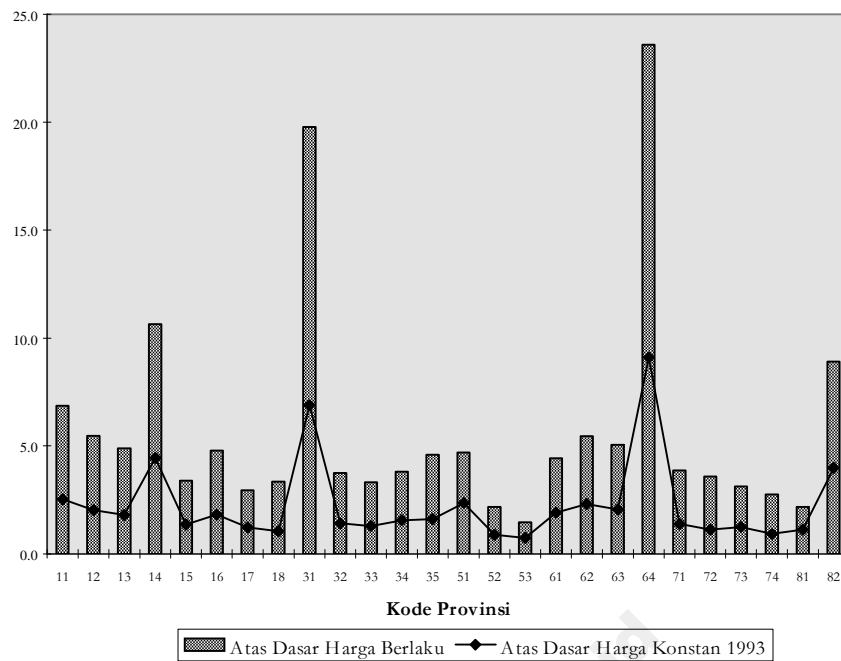


Gambar 3.1. Distribusi Persentase PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 1999



Selanjutnya, apabila ditinjau dari nilai PDRB Nominal perkapita pada tahun 1999 maka posisi tiga terbesar, berturut-turut, ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur (23,6 juta rupiah), Provinsi DKI Jakarta (19,8 juta rupiah), dan Provinsi Riau (10,6 juta rupiah). Posisi yang sama dari nilai PDRB Riil perkapita pada tahun 1999 juga ditempati oleh ketiga provinsi tersebut, berturut-turut, masing-masing sebesar 9,1 juta rupiah, 6,9 juta rupiah, dan 4,4 juta rupiah. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, dilihat dari keberadaan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibukota negara, maka Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai provinsi acuan dalam analisis berikutnya. Gambar 3.2. berikutnya memberikan penjelasan secara visual PDRB perkapita provinsi-provinsi di Indonesia tahun 1999 (dalam jutaan rupiah).

Gambar 3.2. Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi-Provinsi di Indonesia, 1999 (dalam juta rupiah)



**Kode provinsi:**

11. Dista Aceh  
12. Sumatera Utara  
13. Sumatera Barat  
14. Riau  
15. Jambi  
16. Sumatera Selatan  
17. Bengkulu  
18. Lampung

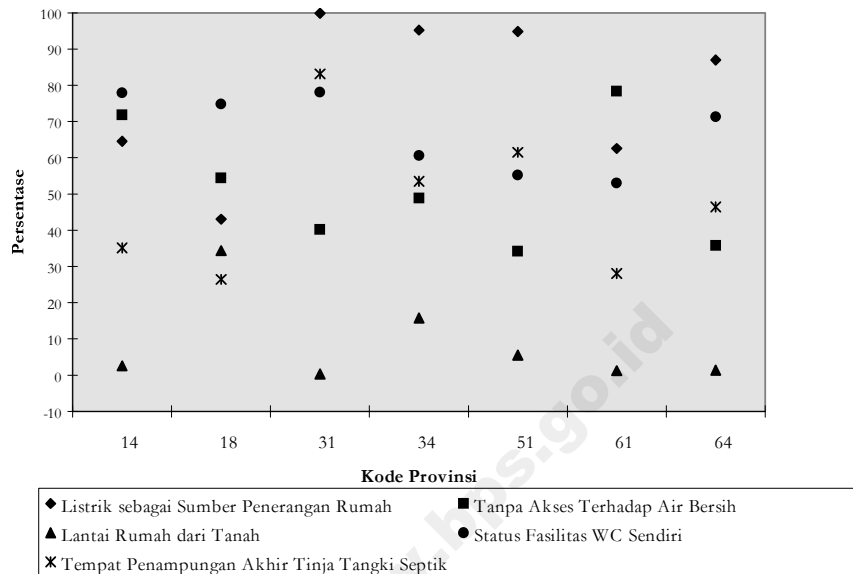
31. DKI Jakarta  
32. Jawa Barat  
33. Jawa Tengah  
34. Dista Yogyakarta  
35. Jawa Timur  
51. Bali  
52. Nusa Tenggara Barat  
53. Nusa Tenggara Timur  
61. Kalimantan Barat

62. Kalimantan Tengah  
63. Kalimantan Selatan  
64. Kalimantan Timur  
71. Sulawesi Utara  
72. Sulawesi Tengah  
73. Sulawesi Selatan  
74. Sulawesi Tenggara  
81. Maluku  
82. Irian Jaya

### 3.1.2. Indikator Perumahan.

Dari uraian pemilihan variabel sebelumnya dipilih 5 variabel yang diharapkan menjelaskan disparitas indikator perumahan antar provinsi. Ditinjau dari persentase rumahtangga yang menggunakan listrik, baik yang bersumber dari listrik PLN maupun dari non PLN, sebagai sumber penerangan rumah maka Provinsi DKI Jakarta menempati posisi terbaik sebesar 99,86 persen, disusul kemudian oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (95,24 persen) dan Provinsi Bali (94,88 persen), lihat Tabel 2, lampiran.

Gambar 3.3. Beberapa Indikator Perumahan Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 1999



Persentase rumahtangga tanpa akses terhadap air bersih paling sedikit ditemui di Provinsi Bali (34,2 persen), disusul dengan Provinsi Kalimantan Timur (35,8 persen) dan Provinsi DKI Jakarta (40,2 persen). Apabila diasumsikan bahwa lantai rumah yang terbuat dari bukan tanah (marmer/keramik, ubin/tegel, semen/batu merah, kayu, dan bambu) lebih baik dari lantai rumah yang terbuat dari tanah maka indikator perumahan di Provinsi DKI Jakarta menempati posisi terbaik. Tercatat Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase terkecil ditinjau dari banyaknya rumahtangga yang sebagian besar lantai rumahnya terbuat dari tanah, yaitu hanya 0,35

persen. Sementara posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Provinsi Kalimantan Barat (1,25 persen) dan Provinsi Kalimantan Timur (1,42 persen).

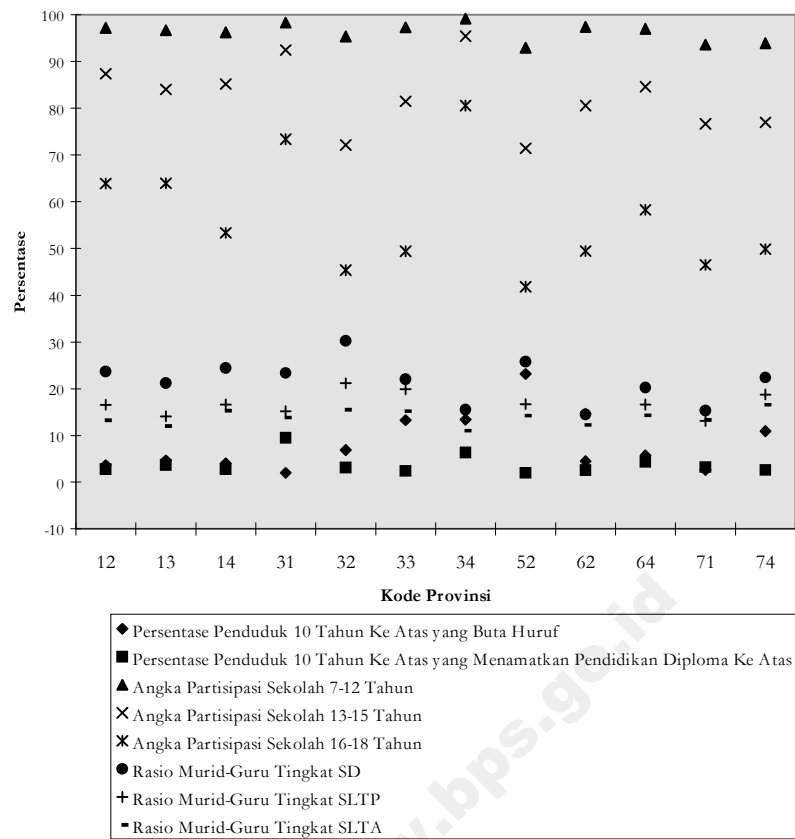
Variabel berikutnya yang digunakan untuk menggambarkan indikator perumahan antar provinsi adalah persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Berdasarkan variabel ini Provinsi DKI Jakarta menempati posisi terbaik dibandingkan provinsi lainnya, yaitu 78,06 persen rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta memiliki sendiri fasilitas tempat buang air besar disusul dengan Provinsi Riau dan Lampung masing-masing sebesar 77,90 persen dan 74,76 persen.

Pada variabel tempat pembuangan akhir kotoran/tinja yang merupakan tangki septik juga terlihat Provinsi DKI Jakarta menempati posisi terbaik dimana sekitar 83,14 persen rumah tangga telah memiliki tempat pembuangan akhir kotoran/tinja dengan tangki septik. Jadi, ditinjau dari kelima variabel yang menggambarkan indikator perumahan ini, Provinsi DKI Jakarta mendominasi peringkat pertama terbaik untuk 4 variabel, yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah, persentase rumah tangga yang sebagian besar lantai rumah terbuat dari tanah, persentase rumah tangga yang status fasilitas tempat buang air besar dimiliki sendiri, dan persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Gambar 3.3. memberikan gambaran visual dari kondisi variabel-variabel dalam indikator perumahan untuk beberapa provinsi yang menempati posisi tiga terbaik.

### **3.1.3. Indikator Pendidikan.**

Indikator pendidikan yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari 8 variabel untuk menggambarkan indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi. Ditinjau dari persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf (tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin dan atau huruf lainnya), Provinsi DKI Jakarta menempati posisi terbaik dengan persentase terkecil (2,00 persen). Sedangkan posisi kedua dan ketiga terbaik ditempati oleh Provinsi Sulawesi Utara (2,61 persen) dan Provinsi Sumatera Utara (3,64 persen), lihat Tabel 3, lampiran.

Gambar 3.4. Beberapa Indikator Pendidikan Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 1999



Provinsi DKI Jakarta juga menempati posisi terbaik ditinjau dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan Diploma ke atas, yaitu sebesar 9,45 persen. Berdasarkan variabel ini posisi kedua dan ketiga terbaik ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (6,35 persen) dan Provinsi Kalimantan Timur (4,35 persen).

Selanjutnya untuk melihat seberapa persen penduduk usia sekolah yang masih bersekolah digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi terbaik berdasarkan

Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun, berturut-turut sebesar 99,19 persen, 95,43 persen, dan 80, 58 persen. Posisi kedua terbaik berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok umur yang sama ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta berturut-turut sebesar 98,38 persen, 92,44 persen, dan 73,39 persen. Sedangkan posisi ketiga terbaik Angka Partisipasi Sekolah untuk ketiga kelompok umur tersebut, berturut-turut, ditempati oleh Provinsi Kalimantan Tengah (97,46 persen), Provinsi Sumatera Utara (87,40 persen), dan Provinsi Sumatera Barat (63,94 persen). Fenomena ini sesuai dengan kenyataan bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dua kota yang dapat disebut sebagai “Kota Pendidikan” dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang lebih memadai dibanding provinsi lainnya.

Indikator lain yang digunakan adalah besarnya rasio murid terhadap guru pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA dimana indikator ini menggambarkan jumlah murid yang berada di bawah tanggung jawab seorang guru dalam proses belajar mengajar. Berbagai informasi yang berkaitan dengan hal ini sering dimuat dalam media massa dimana masih ditemukan sekolah-sekolah di beberapa daerah yang sangat kekurangan tenaga guru/pengajar. Secara umum, rasio murid terhadap guru berturut-turut berkisar antara 14-30 murid per guru SD, 13-21 murid per guru SLTP, dan 11-17 murid per guru SLTA. Posisi terburuk berdasarkan variabel rasio murid-guru pada tingkat SD dan SLTP ditempati oleh Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 30 murid per guru SD dan 21 murid per guru SLTP sehingga tanggung jawab guru semakin besar. Sedangkan posisi terburuk rasio murid-guru pada tingkat SLTA ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 17 murid per guru. Secara visual, gambaran beberapa variabel dalam indikator pendidikan untuk beberapa provinsi yang menempati posisi tiga terbaik dapat dilihat pada Gambar 3.4.

### 3.1.4. Indikator Ketenagakerjaan

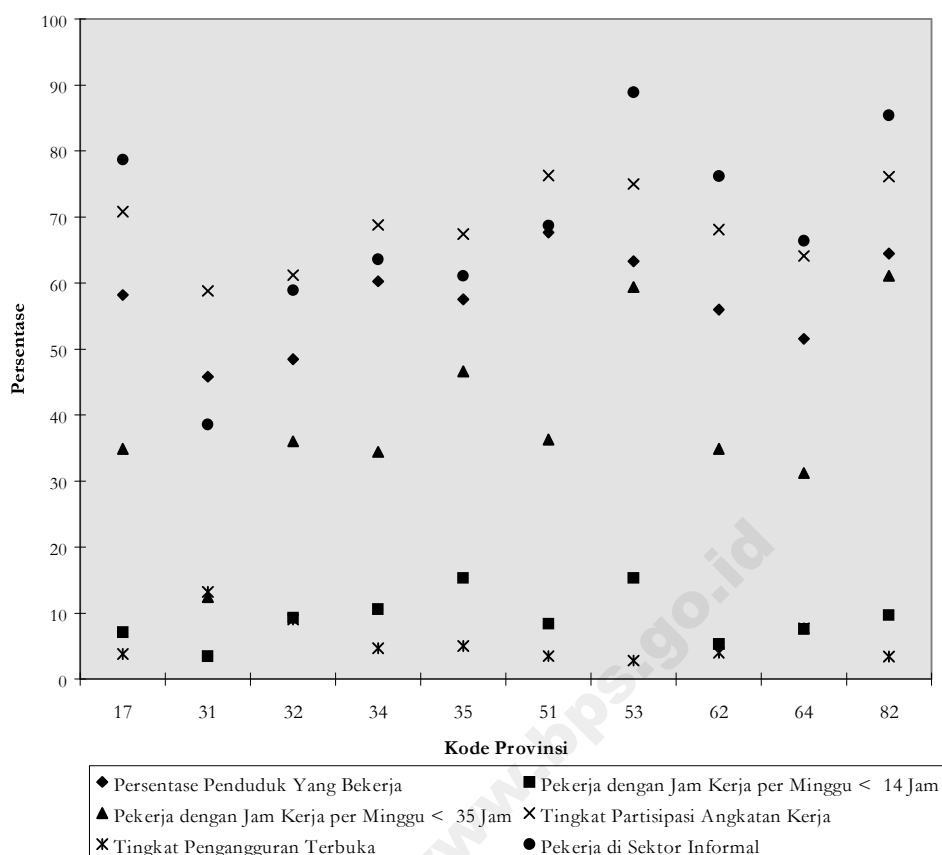
Bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Ditinjau dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja maka Provinsi Bali memiliki daya serap tenaga kerja paling tinggi dibanding provinsi lainnya. Hal ini terlihat dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menempati posisi terbaik sebesar 67,66 persen. Sedangkan posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 64,48 persen dan 63,32 persen. Apabila dikaitkan dengan jumlah jam kerja per minggu, terlihat pekerja dengan jumlah jam kerja per minggu <14 jam paling sedikit ditemui di Provinsi DKI Jakarta (3,5 persen), disusul dengan Provinsi Kalimantan Tengah (5,3 persen) dan Provinsi Bengkulu (7,1 persen). Demikian pula untuk kasus setengah pengangguran (jam kerja per minggu < 35 jam) paling sedikit juga ditemui di Provinsi DKI Jakarta (12,4 persen), disusul di Provinsi Kalimantan Timur (31,2 persen), dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (34,4 persen), lihat Tabel 4, lampiran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio antara jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja dan mencari pekerjaan (dikelompokkan sebagai angkatan kerja) dan jumlah penduduk usia kerja (batasan yang digunakan 10 tahun ke atas), dinyatakan dalam bentuk persentase. Ukuran ini menggambarkan seberapa banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar TPAK di suatu provinsi, maka semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan diharapkan makin baik pula tingkat kesejahteraannya. Pada tahun 1999 provinsi-provinsi dengan TPAK tinggi adalah Provinsi Bali (76,3 persen), Provinsi Irian Jaya (76,1 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (75,0 persen).

Konsep pengangguran terbuka yang digunakan BPS adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. Indikator yang digunakan berkaitan dengan hal ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT ini dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Ukuran ini menggambarkan seberapa besar rasio pencari kerja terhadap total angkatan kerja yang ada, artinya semakin kecil persentase TPT di suatu provinsi maka kondisi ketenagakerjaan di provinsi tersebut secara relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 1999, tiga provinsi yang

memiliki TPT terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (2,8 persen), Provinsi Irian Jaya (3,4 persen), dan Provinsi Bali (3,5 persen).

**Gambar 3.5. Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 1999**



Pekerja di sektor informal adalah mereka yang bekerja sebagai wirausahawan, bekerja dengan bantuan anggota keluarga/pekerja keluarga, atau pekerja keluarga baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Pada tahun 1999, provinsi-provinsi dengan persentase pekerja informal terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta (38,6 persen), Provinsi Jawa Barat (58,9 persen), dan Provinsi Jawa Timur (61,1 persen). Ditinjau dari segi keamanan kegiatan ekonomi suatu daerah cenderung menempatkan sektor



formal sebagai acuan. Meskipun demikian, sesungguhnya sektor informal ini turut berperan dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Bahkan pengalaman dalam masa krisis ekonomi yang lalu menunjukkan sektor informal ini lebih mampu bertahan menghadapi berbagai persoalan dan cenderung sebagai sektor penyelamat bagi mereka yang terpuruk dari kegiatan di sektor formal. Secara visual, gambaran beberapa variabel dalam indikator ketenagakerjaan untuk beberapa provinsi yang menempati posisi tiga terbaik dapat dilihat pada Gambar 3.5.

#### **3.1.5. Indikator Kesehatan.**

Ada 6 variabel terpilih yang akan digunakan sebagai indikator kesehatan antar provinsi dalam analisis deskriptif ini. Salah satu diantaranya adalah angka harapan hidup pada waktu lahir ( $e_0$ ) yang menunjukkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Data tahun 1999 menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi DKI Jakarta memiliki angka harapan hidup yang paling lama dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebesar 70,2 tahun. Selanjutnya penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah menduduki posisi kedua dan ketiga dengan angka harapan hidup masing-masing sebesar 69,9 tahun dan 68,3 tahun, lihat Tabel 5, lampiran.

Variabel lain yang dapat digunakan sebagai indikator kesehatan antar provinsi adalah angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menggambarkan perbandingan jumlah kematian bayi dibawah umur 1 tahun selama tahun tertentu terhadap 1000 bayi yang lahir hidup dalam tahun yang sama. Angka kematian bayi terendah pada tahun 1999 terjadi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 24 bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Posisi kedua dan ketiga terendah berikutnya terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (25 bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup) dan Provinsi Bali (31 bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup). Sedangkan angka kematian bayi tertinggi pada tahun 1999 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana ditemukan kasus kematian 81 bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup.

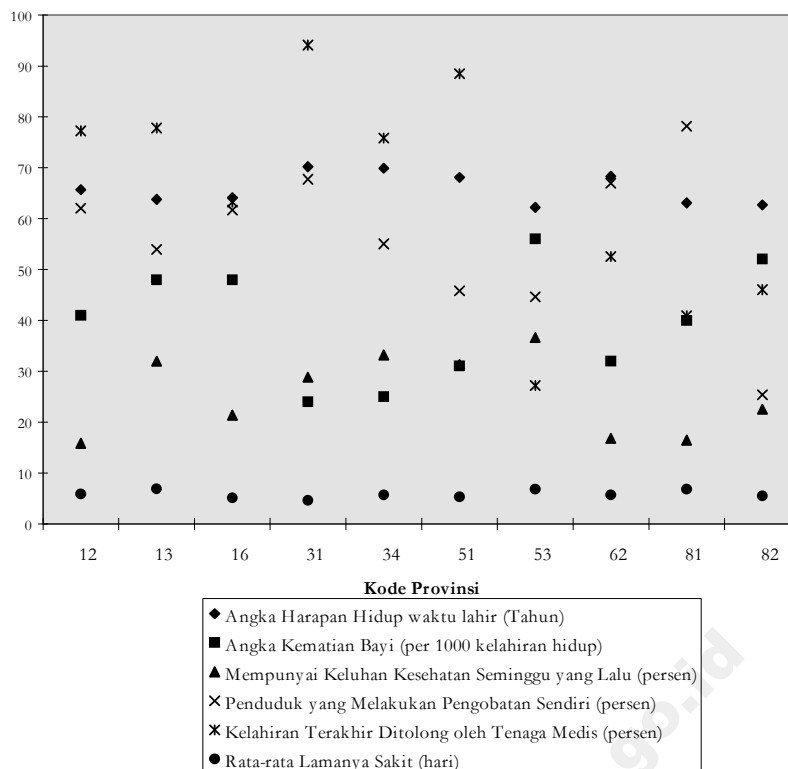
Mempunyai keluhan kesehatan sebulan yang lalu juga dipilih sebagai indikator kesehatan antar provinsi. Keluhan kesehatan meliputi panas, batuk, pilek, asma, nafas sesak/cepat, diare/buang-buang air, campak, telinga berair/congek, sakit kuning/liver, sakit kepala berulang, kejang-kejang/ayan, lumpuh, pikun, kecelakaan, sakit gigi, dan lainnya. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi berbagai kegiatan sehari-hari dari penduduk

yang mengalaminya dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat hidupnya. Tiga provinsi yang memiliki persentase terendah dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir adalah Provinsi Sumatera Utara (15,84 persen), Provinsi Maluku (16,46 persen), dan Provinsi Kalimantan Tengah (16,81 persen). Sedangkan persentase tertinggi dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 36,66 persen.

Indikator lain tentang kesehatan adalah persentase penduduk sakit yang melakukan pengobatan sendiri. Melalui indikator ini dapat dilihat persentase penduduk sakit yang tidak menggunakan sarana kesehatan. Indikator ini dihitung dari perbandingan jumlah penduduk sakit/mengeluh yang diobati sendiri terhadap jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu. Semakin kecil indikator ini semakin tinggi tingkat kesadaran penduduk untuk memanfaatkan sarana kesehatan dan secara tidak langsung juga menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi penduduk. Tiga provinsi yang memiliki persentase terendah dari penduduk yang melakukan pengobatan sendiri adalah Provinsi Irian Jaya (25,40 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (44,64 persen), dan Provinsi Bali (45,81 persen). Sedangkan persentase tertinggi terjadi di Provinsi Maluku yaitu sebesar 78,16 persen.

Persentase persalinan yang ditolong tenaga medis (bidan, dokter, dan tenaga medis lainnya) juga merupakan variabel penting dalam indikator kesehatan. Selain dapat menggambarkan ketersediaan dan akses penduduk akan tenaga pelayanan kesehatan, variabel tersebut juga dapat menjadi sinyal tingkat kemampuan ekonomi penduduk.

Gambar 3.6. Beberapa Indikator Kesehatan Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 1999



Persalinan yang dicakup dalam tulisan ini adalah kelahiran terakhir anak yang saat pencacahan berusia 0-59 bulan. Peringkat terbaik terjadi di Provinsi DKI Jakarta dimana 94,11 persen persalinan dari balita pada tahun 1999 yang merupakan kelahiran terakhir ditolong oleh tenaga medis. Kemudian kondisi terbaik berikutnya terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Barat masing-masing sebesar 88,50 persen dan 77,83 persen. Kondisi terburuk terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana hanya 26,86 persen persalinan balita kelahiran terakhir pada tahun 1999 yang ditolong oleh tenaga medis.

Indikator rata-rata lama sakit/keluhan digunakan untuk menggambarkan tingkat intensitas penyakit/keluhan yang dialami penduduk. Selain itu juga menggambarkan besarnya kerugian yang dialami

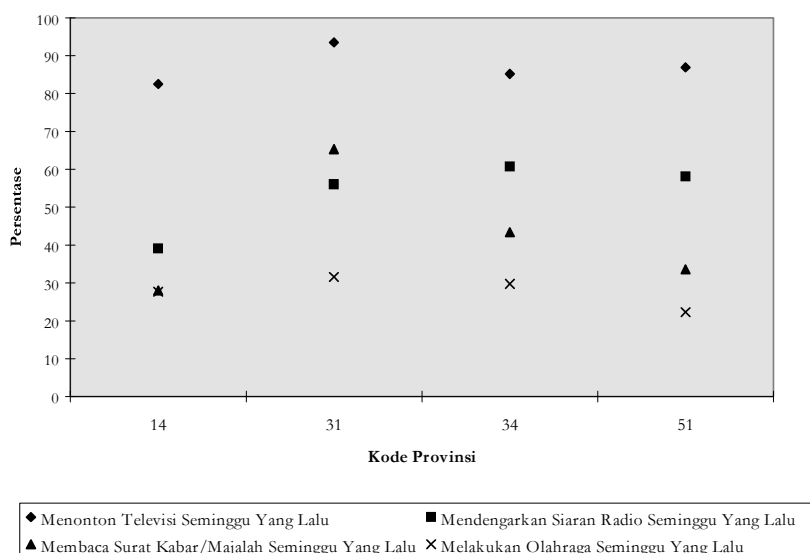
penduduk karena penyakit yang diderita. Indikator ini dihitung dari perbandingan jumlah orang-hari penduduk yang menderita sakit terhadap jumlah penduduk sakit. Semakin besar nilai indikator ini semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialaminya. Data pada tahun 1999 menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata lamanya sakit terkecil dibandingkan provinsi lainnya, yaitu 4,6 hari. Sedangkan rata-rata lamanya sakit tertinggi yaitu 6,9 hari terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah. Secara visual, gambaran beberapa variabel dalam indikator kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.6.

### **3.1.6. Indikator Kesenangan/Sosial Budaya.**

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab pemilihan variabel maka ada 4 variabel yang akan ditinjau sebagai indikator kesenangan/sosial budaya. Indikator ini dihitung dengan menggunakan data hasil pencacahan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Susenas tahun 2000. Keempat variabel tersebut mencakup kegiatan sosial budaya penduduk berusia 10 tahun ke atas secara perorangan dalam hal akses terhadap media massa (menonton televisi, mendengarkan siaran radio), kegiatan membaca (surat kabar/majalah), dan partisipasi dalam kegiatan olahraga.

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur akses penduduk terhadap media massa adalah angka partisipasi yang didefinisikan UNDP sebagai tingkat keterlibatan penduduk dalam proses ekonomi, sosial, budaya maupun politik yang berdampak terhadap kehidupannya (BPS, 2000e). Partisipasi dalam proses sosial khususnya tingkat pemanfaatan radio/televisi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang mendengarkan radio/menonton televisi dibagi jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Termasuk juga dalam partisipasi proses sosial adalah tingkat pemanfaatan surat kabar/majalah yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang membaca surat kabar/majalah dibagi jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas.

Gambar 3.7. Beberapa Indikator Kesenangan/Sosial Budaya Menurut Provinsi Yang Menempati Posisi Tiga Terbaik, 2000



Tingkat partisipasi penduduk Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh informasi dari media massa elektronik terutama televisi menempati posisi terbaik dimana 93,5 persen penduduk berusia 10 tahun ke atas tercatat menonton televisi seminggu yang lalu. Posisi kedua dan ketiga terbaik untuk hal yang sama tercatat di Provinsi Bali (86,9 persen) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (85,2 persen). Kondisi paling buruk tingkat partisipasi penduduk dalam hal menonton televisi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (28,1 persen) dan Irian Jaya (26,6 persen). Posisi tiga terbaik ditinjau dari tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan membaca surat kabar/majalah juga ditempati oleh ketiga provinsi tersebut masing-masing sebesar 65,3 persen di Provinsi DKI Jakarta, 43,4 persen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 33,6 persen di Provinsi Bali, lihat Tabel 6, lampiran.

Ditinjau dari tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan mendengarkan siaran radio, posisi terbaik ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 60,7 persen. Sedangkan posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Provinsi Bali dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 58,1 persen dan 56,0 persen.

Demikian pula tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan olahraga maka posisi terbaik juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta (31,6 persen),

disusul dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (29,8 persen) dan Provinsi Riau (27,7 persen). Secara visual, gambaran beberapa variabel dalam indikator kesenangan/sosial budaya untuk tiga provinsi terbaik disajikan dalam Gambar 3.7.

### 3.1.7. Indikator Secara Umum

Melalui penjelasan secara deskriptif dari beberapa indikator yang diteliti telah dapat dilihat bagaimana kondisi penduduk di suatu provinsi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Dari 29 variabel yang diamati, Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat terbaik untuk sekitar 16 variabel. Berdasarkan hal ini dalam analisis selanjutnya Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai “Provinsi Model” atau “Provinsi Acuan”. Meskipun demikian, perlu juga disadari bahwa Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam beberapa hal dibanding provinsi-provinsi lainnya seperti rendahnya akses penduduk terhadap air bersih dan rendahnya persentase penduduk usia kerja yang bekerja.

### 3.2. Metode Taksonomik

Ada 2 komponen indeks disparitas tingkat hidup yang dihasilkan Metode Taksonomik, yaitu: 1) Pola Pembangunan (*Pattern of Development*) dan 2) Ukuran Pembangunan (*Measure of Development*). Kedua ukuran tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam menentukan besaran indeks tingkat hidup suatu provinsi. Sedangkan nilai dari ukuran pembangunan digunakan untuk menentukan peringkat indeks tingkat hidup antar provinsi yang diteliti. Sebagaimana dijelaskan pada bab metodologi, jika nilai dari pola pembangunan semakin tinggi atau semakin mendekati nilai 1 maka berbagai karakteristik dari provinsi yang bersangkutan akan semakin jauh dari provinsi model. Selanjutnya jika nilai dari ukuran pembangunan semakin mendekati nilai 1 maka provinsi tersebut dikatakan semakin tidak berkembang. Pernyataan ini dikaitkan dengan asumsi bahwa Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai “Provinsi Model atau Provinsi yang dijadikan Acuan”, dimana nilai dari pola pembangunan dan ukuran pembangunan sama dengan nol.

Analisis berikut ini juga akan membahas keterkaitan antara peringkat indeks tingkat hidup antar provinsi yang diperoleh secara terpisah maupun secara menyeluruh (komposit) terhadap peringkat indeks disparitas PDRB menurut provinsi. Indeks disparitas PDRB menurut provinsi ini dihitung dari variabel PDRB maupun PDRB perkapita tahun 1999 berdasarkan atas dasar harga konstan 1993. Peringkat indeks disparitas tingkat hidup dengan peringkat indeks disparitas PDRB seharusnya sama dan searah apabila potensi perekonomian daerah diimplementasikan secara tepat dan berdaya guna ke dalam berbagai bidang kehidupan penduduk. Secara visual, gambar dari kedua peringkat tersebut untuk setiap provinsi seharusnya akan berhimpitan satu sama lain, artinya segala potensi perekonomian daerah yang dimiliki telah dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyatnya yang terlihat dari indikator-indikator terpilih. Dengan demikian, melalui analisis visual akan diperoleh gambaran kasar tentang seberapa jauh ketimpangan hasil-hasil pembangunan daerah di beberapa bidang kehidupan masyarakatnya secara umum jika dibandingkan dengan potensi perekonomian daerah yang dimilikinya.

### 3.2.1. Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Secara Terpisah

Analisis indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi secara terpisah dibedakan atas 5 indikator, yaitu perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesenangan/sosial budaya. Analisis terpisah untuk masing-masing indikator ini akan menghasilkan nilai dari pola pembangunan dan ukuran pembangunan yang merupakan komponen dari indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi.

Langkah selanjutnya adalah menentukan peringkat dari indeks disparitas tingkat hidup untuk setiap provinsi dengan menggunakan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi model atau acuan, artinya indeks tingkat hidup Provinsi DKI Jakarta untuk setiap indikator akan menempati peringkat 1. Tabel 3.1. berikut ini menggambarkan peringkat indeks tingkat hidup setiap provinsi berdasarkan indikator yang diamati.

**Tabel 3.1. Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Indikator dan Provinsi Tahun 1999**

Kode	Provinsi	Indikator				
		Perumahan	Pendidikan	Ketenagaker-	Kesehatan	Kesenangan/

				jaan		Sosial Budaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Dista Aceh	16	11	14	14	24
12.	Sumatera Utara	5	5	6	11	15
13.	Sumatera Barat	18	4	15	17	7
14.	Riau	12	7	5	5	5
15.	Jambi	15	10	10	13	23
16.	Sumatera Selatan	9	14	7	8	10
17.	Bengkulu	10	9	17	15	11
18.	Lampung	22	12	16	10	16
31.	<b>DKI Jakarta (provinsi model/acuan)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
32.	Jawa Barat	8	21	2	18	4
33.	Jawa Tengah	17	17	9	7	8
34.	Dista Yogyakarta	4	3	8	2	2
35.	Jawa Timur	13	16	13	12	12
51.	Bali	2	8	23	3	3
52.	Nusa Tenggara Barat	21	24	24	26	21
53.	Nusa Tenggara Timur	26	25	26	25	26
61.	Kalimantan Barat	24	22	19	19	18
62.	Kalimantan Tengah	23	13	11	9	14
63.	Kalimantan Selatan	11	19	22	20	17
64.	Kalimantan Timur	3	2	3	4	6
71.	Sulawesi Utara	6	15	4	6	9
72.	Sulawesi Tengah	20	23	20	24	13
73.	Sulawesi Selatan	7	20	21	16	20
74.	Sulawesi Tenggara	14	18	18	22	22
81.	Maluku	19	6	12	21	19
82.	Irian Jaya	25	26	25	23	25



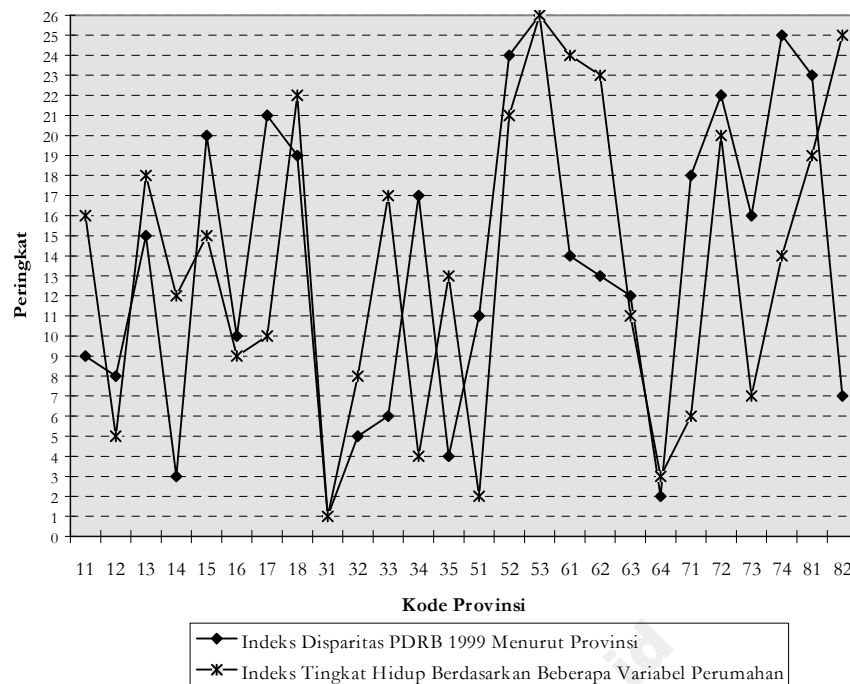
Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa lima peringkat terbaik indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi berdasarkan beberapa variabel perumahan, selain Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi acuan, ditempati oleh Provinsi Bali, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan provinsi-provinsi yang menempati lima peringkat terburuk (peringkat 22-26), berturut-turut adalah Provinsi Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Irian Jaya, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disamping itu, uraian selanjutnya juga akan menyoroti sejauh mana keterkaitan antara peringkat indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi berdasarkan indikator dengan indeks disparitas PDRB tahun 1999. Indeks disparitas PDRB ini diasumsikan sebagai indikator penyebab atau indikator input yang menyebabkan kenapa masyarakat di daerah tertentu memiliki tingkat hidup yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Penghitungan indeks disparitas PDRB juga menggunakan metode taksonomik dimaksudkan untuk menjamin keterbandingan peringkat dari indeks ini dengan peringkat indeks tingkat hidup antar provinsi dengan menggunakan provinsi acuan yang sama. Peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 untuk setiap provinsi disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Peringkat Indeks Disparitas PDRB Antar Provinsi  
Tahun 1999**

Kode	Provinsi	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Indeks Disparitas PDRB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Dista Aceh	0.693882432	0.266814358	9
12.	Sumatera Utara	0.632900791	0.243365461	8
13.	Sumatera Barat	0.763827913	0.293710065	15
14.	Riau	0.482508963	0.185536214	3
15.	Jambi	0.831571075	0.319758928	20
16.	Sumatera Selatan	0.715911368	0.27528501	10
17.	Bengkulu	0.853257333	0.328097812	21
18.	Lampung	0.825450461	0.317405406	19
<b>31.</b>	<b>DKI Jakarta (provinsi model/acuan)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
32.	Jawa Barat	0.569081626	0.218825469	5
33.	Jawa Tengah	0.614122043	0.236144585	6
34.	Dista Yogyakarta	0.803695266	0.309040014	17
35.	Jawa Timur	0.54741932	0.210495795	4
51.	Bali	0.727505672	0.279743296	11
52.	Nusa Tenggara Barat	0.864160374	0.332290291	24
53.	Nusa Tenggara Timur	0.880108128	0.338422584	26
61.	Kalimantan Barat	0.760155641	0.292297989	14
62.	Kalimantan Tengah	0.758980315	0.291846048	13
63.	Kalimantan Selatan	0.758252743	0.291566279	12
64.	Kalimantan Timur	0.459229532	0.176584717	2
71.	Sulawesi Utara	0.823010131	0.316467041	18
72.	Sulawesi Tengah	0.855064513	0.328792716	22
73.	Sulawesi Selatan	0.789292731	0.303501895	16
74.	Sulawesi Tenggara	0.875785412	0.336760396	25
81.	Maluku	0.856135347	0.329204477	23
82.	Irian Jaya	0.62366422	0.23981378	7

Gambar 3.8. Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Perumahan



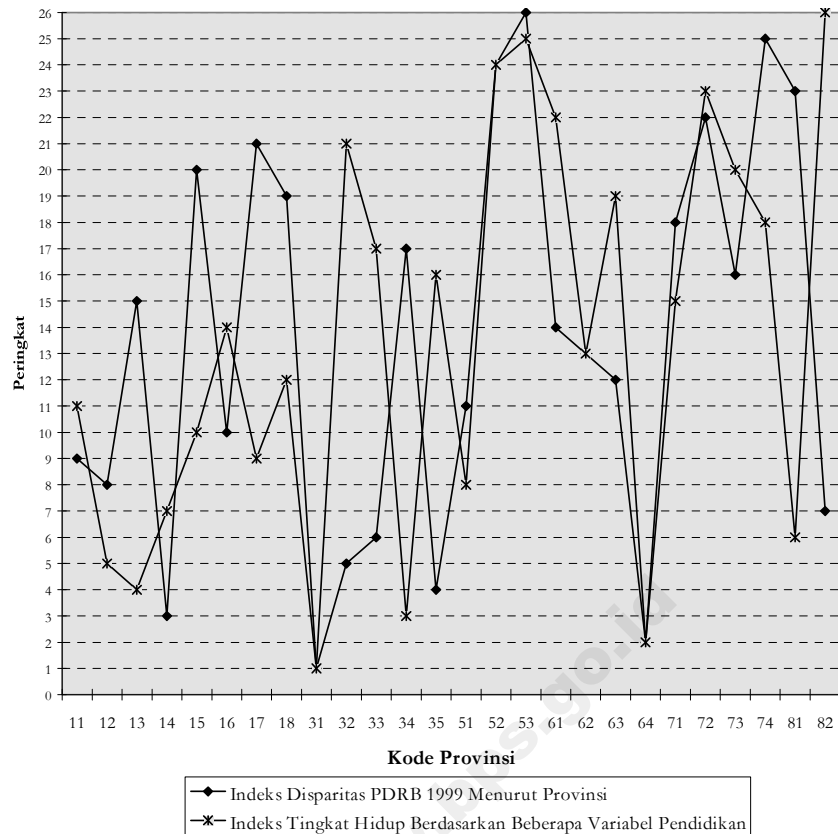
Secara visual, dari Gambar 3.8. di atas terlihat rentang antara peringkat indeks disparitas tingkat hidup khusus untuk indikator perumahan dengan peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu-satunya provinsi (selain provinsi acuan) yang memiliki peringkat sama antara peringkat indeks disparitas tingkat hidup perumahan dengan peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999, yaitu sama-sama berada pada peringkat terburuk (26). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keteringgalan pembangunan sektor perumahan di Nusa Tenggara Timur memang dikarenakan rendahnya potensi perekonomian daerah yang bersangkutan. Pada kasus lain terlihat peringkat indeks disparitas tingkat hidup perumahan jauh lebih baik (deviasi 5 atau lebih) dari peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 seperti terjadi pada Provinsi Jambi, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa provinsi-provinsi tersebut telah mampu mengoptimalkan potensi perekonomian daerahnya untuk membangun kesejahteraan

rakyatnya khususnya di bidang perumahan. Kenyataan menyedihkan terjadi bila peringkat indeks disparitas tingkat hidup perumahan jauh lebih buruk dari peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 yang berarti pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan perekonomian daerahnya untuk membangun sektor perumahan. Hal ini terjadi pada Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Irian Jaya. Deviasi paling parah terjadi di Provinsi Irian Jaya dimana indeks disparitas PDRB tahun 1999 menempati peringkat ketujuh terbaik sementara indeks disparitas tingkat hidup perumahan menempati peringkat ke-25 (posisi kedua terburuk).

Lima peringkat terbaik indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi berdasarkan beberapa variabel pendidikan, selain Provinsi DKI Jakarta (sebagai provinsi acuan), ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Maluku. Sedangkan provinsi-provinsi yang menempati peringkat lima terburuk (peringkat 22-26), berturut-turut, adalah Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Irian Jaya (lihat Tabel 3.1.).

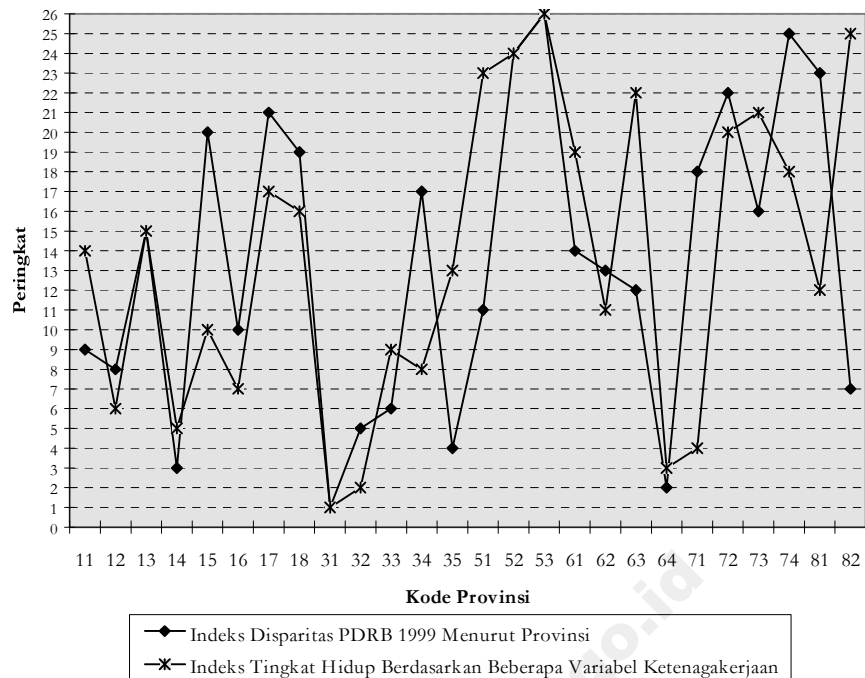
Melalui Gambar 3.9. akan dapat dilihat keterkaitan antara peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 dengan peringkat indeks disparitas tingkat hidup berdasarkan beberapa variabel pendidikan. Secara visual, terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat memiliki peringkat yang sama dalam hal peringkat indeks disparitas tingkat hidup pendidikan dan peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999, selain Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi acuan yaitu masing-masing pada peringkat 2, peringkat 13 dan peringkat 24. Beberapa provinsi yang dapat dikategorikan belum berhasil mengoptimalkan potensi perekonomian daerahnya untuk pembangunan di bidang pendidikan antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Irian Jaya. Sebaliknya, Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku merupakan provinsi-provinsi yang dapat dikategorikan telah berhasil mengimplementasikan potensi perekonomian daerahnya dalam program-program pembangunan di bidang pendidikan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 3.9. Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Pendidikan



Lima peringkat terbaik indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi berdasarkan beberapa variabel ketenagakerjaan, selain Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi acuan, ditempati oleh Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Riau, dan Sumatera Utara. Sedangkan posisi lima peringkat terburuk (peringkat 22-26) ditempati oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur (lihat Tabel 3.1.).

**Gambar 3.10. Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Ketenagakerjaan**



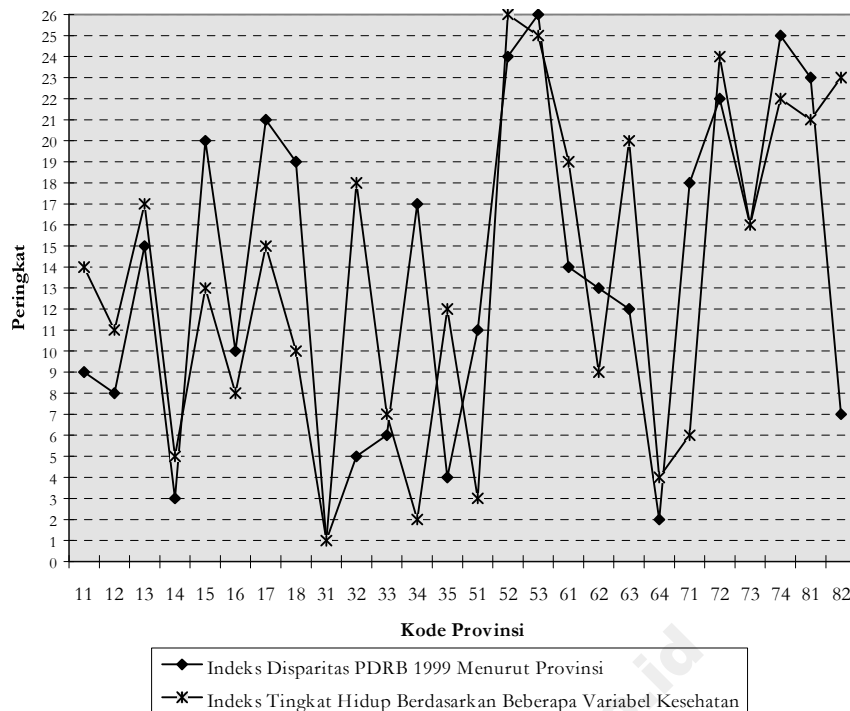
Secara visual, Gambar 3.10. menunjukkan beberapa provinsi yang memiliki peringkat sama dalam hal peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 dengan peringkat indeks disparitas tingkat hidup berdasarkan beberapa variabel ketenagakerjaan (selain Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi acuan), yaitu Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing berada pada peringkat 15, 24, dan 26. Provinsi-provinsi yang memiliki peringkat indeks disparitas tingkat hidup ketenagakerjaan jauh lebih baik dibanding peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 adalah Provinsi Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sebaliknya, provinsi-provinsi yang memiliki peringkat indeks disparitas tingkat hidup ketenagakerjaan jauh lebih buruk dibanding peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya. Deviasi yang paling besar

terjadi di Provinsi Irian Jaya yang menempati peringkat 7 dalam hal indeks disparitas PDRB tahun 1999 sementara indeks disparitas tingkat hidup berdasarkan beberapa variabel ketenagakerjaan menempati peringkat 25. Fenomena inilah yang secara visual ditunjukkan pada Gambar 3.10. dikatakan sebagai ketimpangan proses pembangunan karena potensi perekonomian daerah yang dimilikinya tidak tercermin dalam indikator bidang ketenagakerjaan masyarakatnya.

Berdasarkan variabel kesehatan terlihat lima peringkat terbaik indeks disparitas tingkat hidup ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Utara. Sedangkan peringkat 22-26 menurut indeks yang sama berturut-turut ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, Irian Jaya, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Beberapa provinsi yang dapat dikatakan telah mengimplementasikan potensi perekonomian daerahnya secara optimal bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakatnya antara lain Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Utara. Sedangkan ketimpangan proses pembangunan di bidang kesehatan dibandingkan dengan potensi perekonomian daerah yang dimilikinya terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Irian Jaya. Keterkaitan antara peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 dan peringkat indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi berdasarkan beberapa variabel kesehatan ditunjukkan secara visual pada Gambar 3.11.

**Gambar 3.11. Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Kesehatan**



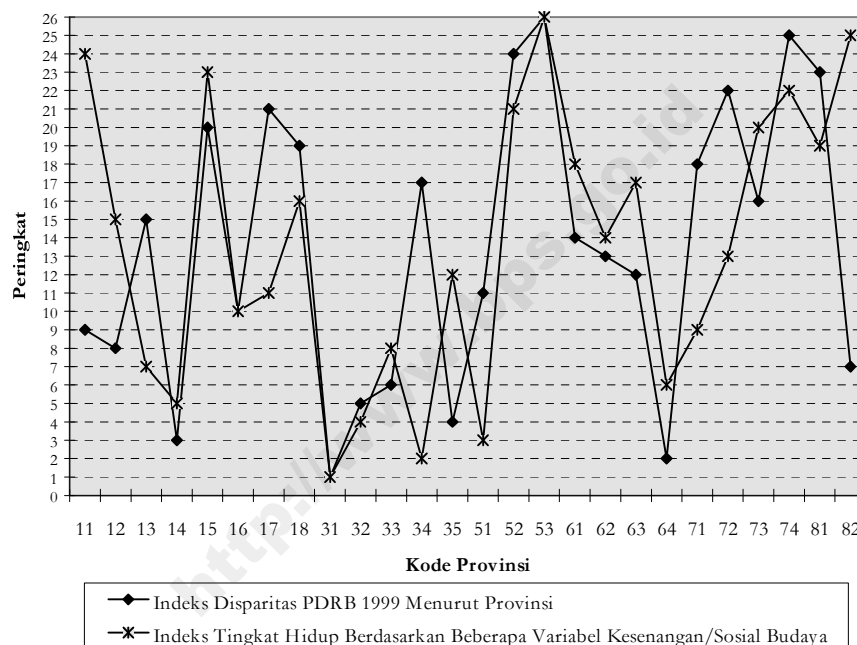
Selain Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi acuan, lima peringkat terbaik indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi berdasarkan beberapa variabel kesenangan/sosial budaya ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Riau, dan Kalimantan Timur. Perlu dicatat bahwa data Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Maluku merupakan hasil estimasi karena data terakhir yang tersedia untuk kondisi tahun 1994. Estimasi dilakukan dengan menggunakan angka rata-rata pertumbuhan per tahun (1994-2000) variabel kesenangan/sosial budaya Provinsi Sulawesi Tengah, dengan asumsi kondisi keamanannya mirip dengan kondisi keamanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Maluku pada tahun 2000. Sedangkan peringkat 22-26 untuk indeks yang sama berturut-turut ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, Jambi, Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur (lihat Tabel 3.1.). Beberapa provinsi yang dapat dikatakan telah mengimplementasikan potensi perekonomian daerahnya secara optimal bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan



kesenangan/sosial budaya tercermin di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sedangkan ketimpangan proses pembangunan yang ditandai dengan kurang berkembangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesenangan/sosial budaya bila dibandingkan dengan potensi perekonomian daerah yang dimilikinya terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya. Keterkaitan antara peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 dan peringkat indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi berdasarkan beberapa variabel kesenangan/sosial budaya ditunjukkan secara visual pada Gambar 3.12.

### 3.2.2. Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Secara Menyeluruh

Gambar 12. Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Beberapa Variabel Kesenangan/Sosial Budaya



Tabel 3.3. memberikan gambaran perbedaan tingkat hidup provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 1999 bila analisis melibatkan seluruh variabel. Dapat dilihat bahwa provinsi-provinsi dengan lima peringkat terbaik indeks disparitas tingkat hidup secara menyeluruh berturut-turut ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Riau (selain Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan).

Pada Tabel 3.3. dapat pula dilihat provinsi-provinsi yang indeks disparitas tingkat hidupnya berada pada peringkat terburuk (22-26) yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan menengok kembali ke Tabel 3.1. terlihat bahwa pada provinsi-provinsi yang mengalami ketertinggalan tersebut, tidak satupun provinsi yang menunjukkan sukses pembangunan meskipun di salah satu bidang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterpurukan pada provinsi-provinsi tersebut terjadi merata di seluruh bidang kehidupan.

Bila kembali merujuk ke Tabel 3.1. dapat dilihat bahwa tingkat hidup penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang relatif baik ini didukung oleh sukses pembangunan di seluruh bidang baik bidang perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, maupun bidang kesenangan/sosial budaya. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, tingkat hidup penduduk yang sudah relatif baik ini antara lain didukung oleh sukses pembangunan di bidang perumahan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Bidang-bidang yang masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan derajat tingkat hidup penduduk Sumatera Utara adalah pembangunan di bidang kesehatan dan kesenangan/sosial budaya. Seperti halnya Provinsi Kalimantan Timur, derajat tingkat hidup penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang relatif baik diwarnai pula oleh peringkat indeks tiap-tiap indikator yang juga relatif baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan secara merata tanpa mengabaikan atau menitikberatkan pembangunan pada bidang tertentu saja. Sedangkan pada Provinsi Bali terlihat tingkat hidup penduduk secara umum sudah relatif baik tetapi masih diwarnai ketimpangan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Demikian pula Provinsi Riau, meskipun indeks disparitas tingkat hidupnya berada pada peringkat 6 tetapi masih perlu meningkatkan pembangunan di bidang perumahan.

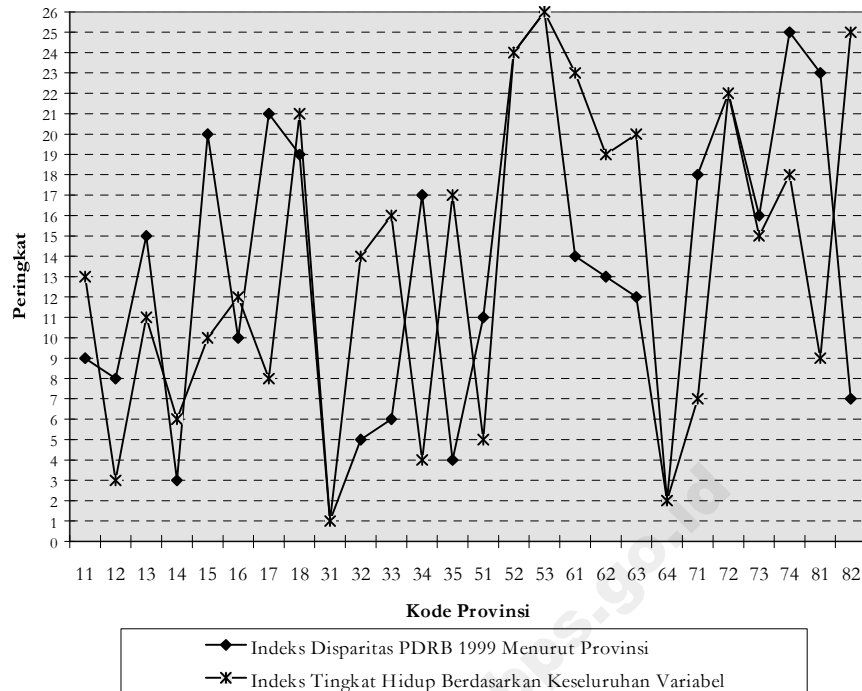
**Tabel 3.3. Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi**

Berdasarkan Keseluruhan Variabel Tahun 1999

Kode	Nama Provinsi	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Indeks Tingkat Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Dista Aceh	1.600938596	0.267636957	13
12.	Sumatera Utara	1.155098147	0.193103567	3
13.	Sumatera Barat	1.507622722	0.252036873	11
14.	Riau	1.415433034	0.236625059	6
15.	Jambi	1.504762514	0.251558718	10
16.	Sumatera Selatan	1.530492489	0.255860127	12
17.	Bengkulu	1.471426415	0.245985754	8
18.	Lampung	1.752647831	0.292998953	21
<b>31.</b>	<b>DKI Jakarta (provinsi model/acuan)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
32.	Jawa Barat	1.667741237	0.27880469	14
33.	Jawa Tengah	1.703694281	0.284815142	16
34.	Dista Yogyakarta	1.195722438	0.199894934	4
35.	Jawa Timur	1.709455497	0.285778273	17
51.	Bali	1.401280247	0.234259067	5
52.	Nusa Tenggara Barat	2.147623385	0.359029003	24
53.	Nusa Tenggara Timur	2.312401016	0.386575708	26
61.	Kalimantan Barat	1.925250347	0.321853784	23
62.	Kalimantan Tengah	1.718926007	0.287361506	19
63.	Kalimantan Selatan	1.741039549	0.291058338	20
64.	Kalimantan Timur	1.009261307	0.168723289	2
71.	Sulawesi Utara	1.432576306	0.239490986	7
72.	Sulawesi Tengah	1.858655112	0.310720723	22
73.	Sulawesi Selatan	1.700719228	0.284317787	15
74.	Sulawesi Tenggara	1.713183049	0.286401427	18
81.	Maluku	1.496541152	0.250184311	9
82.	Irian Jaya	2.20924831	0.369331151	25

Bila indeks disparitas tingkat hidup berdasarkan keseluruhan variabel dikaitkan dengan indeks disparitas PDRB tahun 1999 terlihat rentang yang bervariasi pada tiap-tiap provinsi (lihat Gambar 3.13.).

**Gambar 3.13. Keterkaitan Peringkat Indeks Disparitas PDRB 1999 dan Peringkat Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi Berdasarkan Keseluruhan Variabel**



Rentang ini terjadi karena adanya perbedaan peringkat antara peringkat indeks disparitas tingkat hidup dengan peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999. Terdapat beberapa provinsi (selain Provinsi DKI Jakarta) memiliki peringkat yang sama untuk kedua indeks tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Timur (peringkat 2), Sulawesi Tengah (peringkat 22), Nusa Tenggara Barat (peringkat 24), dan Nusa Tenggara Timur (peringkat 26). Pada kondisi yang demikian dapat dikatakan bahwa sukses maupun keteringgalan pembangunan di provinsi tersebut memang berkaitan dengan potensi perekonomian yang dimilikinya. Di sisi lain bila peringkat indeks disparitas tingkat hidup jauh lebih buruk dari peringkat indeks disparitas PDRB dipandang telah terjadi ketimpangan dalam pembangunan karena

pemerintah setempat belum dapat mengimplementasikan potensi perekonomiannya secara optimal. Kondisi seperti ini terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya. Namun terdapat pula beberapa daerah yang telah berprestasi karena dengan keterbatasan kemampuan perekonomian yang dimilikinya telah mampu meraih tingkat hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya seperti terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

<http://www.bps.go.id>



## **BAB IV PENUTUP**

Dari uraian bab-bab sebelumnya dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh penerapan metode taksonomik dalam menentukan indeks dan peringkat tingkat hidup antar provinsi, serta menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi model/acuan, dapat diringkas beberapa hal atau temuan berikut ini:

1. Penerapan Metode Taksonomik dapat memberikan sinyal atau peringatan dini tentang sejauh mana potensi perekonomian daerah seperti tercermin dalam berbagai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai hasil implementasi dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang berorientasi kepada rakyat. Secara sederhana, hasil indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi dapat digunakan sebagai acuan awal dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai suatu daerah.
2. Lima provinsi yang memiliki peringkat terbaik indeks disparitas PDRB tahun 1999, selain Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi model atau acuan, berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan lima provinsi dengan peringkat terburuk (posisi 22-26) untuk hal yang sama, berturut-turut, adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.
3. Lima provinsi yang memiliki peringkat terbaik indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi tahun 1999 berdasarkan keseluruhan variabel, selain Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi model atau acuan, berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Riau. Sedangkan lima provinsi dengan peringkat terburuk (posisi 22-26) untuk hal yang sama, berturut-turut, adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Provinsi-provinsi yang mempunyai peringkat sama baik pada indeks disparitas PDRB maupun pada indeks disparitas tingkat hidup berdasarkan keseluruhan variabel adalah Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi model atau acuan pada peringkat 1 (terbaik), Provinsi Kalimantan Timur (peringkat 2), Provinsi Sulawesi Tengah (peringkat

22), Provinsi Nusa Tenggara Barat (peringkat 24), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (peringkat 26).

5. Provinsi-provinsi yang mempunyai peringkat indeks disparitas PDRB lebih baik dibanding indeks disparitas tingkat hidup berdasarkan keseluruhan variabel dapat dikatakan sebagai provinsi-provinsi yang belum berhasil secara optimal dalam mengimplementasikan potensi perekonomian daerahnya untuk membangun berbagai bidang kehidupan masyarakatnya. Implementasi yang baik tentunya akan tercermin melalui pesatnya berbagai indikator bidang kehidupan masyarakat seperti indikator perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesenangan/sosial budaya. Provinsi-provinsi tersebut dengan masing-masing peringkatnya secara berturut-turut, adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (9 dan 13), Riau (3 dan 6), Sumatera Selatan (10 dan 12), Lampung (19 dan 21), Jawa Barat (5 dan 14), Jawa Tengah (6 dan 16), Jawa Timur (4 dan 17), Kalimantan Barat (14 dan 23), Kalimantan Tengah (13 dan 19), Kalimantan Selatan (12 dan 20), dan Irian Jaya (7 dan 25).
6. Sebaliknya, provinsi-provinsi yang dapat dikatakan telah berhasil secara optimal mengimplementasikan potensi perekonomian daerahnya dalam membangun berbagai bidang kehidupan masyarakatnya, masing-masing dengan peringkat indeks disparitas PDRB tahun 1999 dan indeks disparitas tingkat hidup berdasarkan keseluruhan variabel secara berturut-turut, adalah Provinsi Sumatera Utara (8 dan 3), Sumatera Barat (15 dan 11), Jambi (20 dan 10), Bengkulu (21 dan 8), Daerah Istimewa Yogyakarta (17 dan 4), Bali (11 dan 5), Sulawesi Utara (18 dan 7), Sulawesi Selatan (16 dan 15), Sulawesi Tenggara (25 dan 18), dan Maluku (23 dan 9).



7. Disarankan implementasi Metode Taksonomik pada tingkat kabupaten/kota sangat mungkin dilakukan. Secara sederhana, hasil indeks disparitas tingkat hidup antar kabupaten/kota dapat digunakan sebagai acuan awal dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai suatu provinsi terhadap daerah-daerah di bawah kewenangannya.

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Aroef, M. 1991. Ekonometrika Terapan 2. Bandung: Tarsito Press.
- Badan Pusat Statistik. 1999a. Indikator Kesejahteraan Rakyat 1998. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1999b. Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999: Metode BPS, Seri Publikasi Susenas Mini 1999, Buku 1. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1999c. Penyempurnaan Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin dan Profil Kemiskinan 1999. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1999d. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999: Sebuah Kajian Sederhana, Seri Publikasi Susenas Mini 1999, Buku 2. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2000a. Laporan Perekonomian Indonesia 2000: Angkatan Kerja, Konsumsi, dan Kemiskinan Penduduk. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2000b. Pengembangan Konsep Desa Perkotaan 1999. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2000c. Sistem Pemantauan Indikator Dini: Tingkat Kemiskinan Kabupaten (Penjelasan Ringkas). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2000d. Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2000e. Statistik Sosial Budaya: Hasil Susenas 2000. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2000f. Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin: Metodologi Penentuan Rumahtangga Miskin 2000. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. 2001a. Laporan Pembangunan Manusia: Menuju Konsensus Baru, Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia 2001. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2001b. Pelatihan Analisis Profil Kependudukan Hasil Sensus Penduduk 2000: Pedoman Teknis. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2001c. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 1997-2000. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2001d. Statistik Indonesia 2000. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Caldwell, J.C. 1983. Education as a Factor in Mortality Decline: An Examination of Nigeria Data. Diringkas dalam "Laporan Seminar Fertilitas Indonesia". Hasil Kerjasama BPS dan BKKBN yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Mei-1 Juni 1983. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Colin Barlow dkk. 1992. Latar Belakang dan Keadaan Daerah dalam Development in Eastern Indonesia: The Case of Nusa Tenggara Timur. Diringkas dalam "Bunga Rampai: Ringkasan Karangan Sosial dan Kependudukan". Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dornbusch, R. dan Fischer, S. 1991. Makroekonomi (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Erlangga.
- Lipsey dkk. 1992. Pengantar Makroekonomi: Jilid I (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Nopirin. 1993. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gajah Mada.
- Puguh B. Irawan dkk. 2000. Analisa Studi Evaluasi Penentuan Kriteria Rumahtangga Miskin Tahun 2000, Hasil Kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan UNICEF. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Ritonga, H. dan Betke F. 2002. Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat yang Khas-Daerah dan Sayang Budaya, Hasil Kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kerjasama Teknis Jerman/Proyek Dukungan Otonomi Daerah (GTZ/PRODA-NT). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sagan, L.A. 1992. Education and Life Expectancy in the Health of Nations. Diringkas dalam Bunga Rampai: Ringkasan Karangan Sosial dan Kependudukan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Suseno, T.W. 1990. Indikator Ekonomi: Dasar-Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.

LAMPIRAN

TABEL - TABEL

<http://www.bps.go.id>

Tabel 1.a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 1999 (Juta Rupiah)

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air Minum	Konstruksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Daerah Istimewa Aceh	7 789 528	9 052 281	5 937 857	48 288	613 547
12. Sumatera Utara	19 536 496	843 000	16 809 641	496 613	2 286 838
13. Sumatera Barat	4 816 942	752 036	2 645 644	239 923	903 636
14. Riau	4 570 901	27 744 713	7 619 494	175 318	1 155 662
15. Jambi	2 622 678	809 352	1 190 706	44 631	210 166
16. Sumatera Selatan	7 169 842	8 070 851	7 706 882	219 330	1 798 560
17. Bengkulu	1 590 263	149 962	196 026	18 861	105 785
18. Lampung	10 721 031	226 343	2 729 790	90 976	1 000 640
31. DKI Jakarta	377 590	0	38 410 536	2 077 736	19 645 532
32. Jawa Barat	28 924 356	8 567 340	55 289 789	3 479 907	5 639 753
33. Jawa Tengah	25 468 190	1 016 023	29 543 973	655 020	3 982 983
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	2 587 522	170 776	1 874 604	84 879	826 970
35. Jawa Timur	37 705 333	3 227 149	41 158 117	2 793 259	7 554 437
51. Bali	3 211 018	102 178	1 420 016	185 983	604 694
52. Nusa Tenggara Barat	3 213 132	308 852	444 260	24 957	684 381
53. Nusa Tenggara Timur	2 489 112	85 835	109 139	37 133	434 842
61. Kalimantan Barat	4 314 066	227 399	3 723 217	113 592	928 921
62. Kalimantan Tengah	4 426 193	336 355	685 474	22 333	454 968
63. Kalimantan Selatan	3 893 651	2 060 863	3 061 536	103 148	663 252
64. Kalimantan Timur	4 220 101	16 998 403	23 916 782	109 721	1 215 573
71. Sulawesi Utara	2 600 720	632 328	932 266	85 385	1 578 277
72. Sulawesi Tengah	3 300 510	164 138	546 709	58 021	503 108
73. Sulawesi Selatan	10 089 431	1 948 803	2 624 709	233 810	1 008 397
74. Sulawesi Tenggara	1 954 234	131 189	401 363	22 516	362 340
81. Maluku	1 626 892	103 875	513 304	41 071	40 560
82. Irian Jaya	2 991 105	11 539 649	747 172	38 441	494 639
INDONESIA <sup>a)</sup>	202 210 837	95 269 693	250 239 006	11 500 852	54 698 461

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

**Lampiran Tabel-Tabel**

Tabel 1.a. Lanjutan.

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Kuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Jasa-jasa	Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11. Daerah Istimewa Aceh	1 475 798	1 215 209	128 955	730 120	26 991 583
12. Sumatera Utara	12 229 426	3 337 004	2 489 414	3 929 129	61 957 561
13. Sumatera Barat	3 674 186	2 749 395	1 004 083	3 728 811	20 514 656
14. Riau	3 335 721	1 196 431	1 178 448	1 582 566	48 559 254
15. Jambi	1 403 175	637 464	315 027	715 958	7 949 157
16. Sumatera Selatan	5 998 715	1 455 488	1 383 797	2 232 980	36 036 445
17. Bengkulu	698 942	548 838	156 094	579 583	4 044 354
18. Lampung	3 699 063	949 989	868 483	1 581 229	21 867 544
31. DKI Jakarta	38 808 975	12 336 726	36 582 906	16 070 342	164 310 343
32. Jawa Barat	31 195 914	8 143 292	4 776 552	13 332 677	159 349 580
33. Jawa Tengah	23 332 685	4 172 495	3 700 159	9 637 666	101 509 194
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	2 188 636	1 112 647	1 033 170	1 883 604	11 762 808
35. Jawa Timur	35 117 958	9 054 826	5 994 827	14 669 173	157 275 079
51. Bali	4 542 147	1 660 064	862 011	1 930 307	14 518 418
52. Nusa Tenggara Barat	1 410 310	807 589	156 218	1 137 390	8 187 089
53. Nusa Tenggara Timur	981 020	432 573	194 830	853 239	5 617 723
61. Kalimantan Barat	3 525 971	1 165 909	859 090	1 441 350	16 299 515
62. Kalimantan Tengah	1 782 585	829 507	199 827	817 051	9 554 293
63. Kalimantan Selatan	2 243 178	1 198 574	389 871	1 164 102	14 778 175
64. Kalimantan Timur	4 080 464	3 508 879	856 581	832 618	55 739 122
71. Sulawesi Utara	1 354 664	1 224 072	310 287	2 063 230	10 781 229
72. Sulawesi Tengah	913 414	539 718	257 300	973 605	7 256 523
73. Sulawesi Selatan	3 553 677	1 424 801	877 615	2 303 650	24 064 893
74. Sulawesi Tenggara	734 420	237 122	179 326	709 868	4 732 378
81. Maluku	922 204	276 898	211 942	534 586	4 271 332
82. Irian Jaya	765 645	453 731	182 665	1 035 733	18 248 780
INDONESIA <sup>a)</sup>	189 968 893	60 669 241	65 149 478	86 470 567	1 016 177 028

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 1.b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 1993  
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 1999 (juta Rupiah)

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air Minum	Konstruksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Daerah Istimewa Aceh	2 488 479	2 071 989	2 736 953	30 299	361 715
12. Sumatera Utara	7 288 312	297 372	4 985 863	356 732	964 611
13. Sumatera Barat	1 636 619	447 384	1 208 092	166 325	292 628
14. Riau	1 664 725	10 675 294	3 841 960	95 005	490 252
15. Jambi	880 435	256 986	566 804	30 294	96 407
16. Sumatera Selatan	2 840 526	2 445 434	2 701 062	121 139	767 262
17. Bengkulu	536 798	53 212	78 117	17 440	47 688
18. Lampung	2 613 954	94 999	958 793	66 577	481 425
31. DKI Jakarta	116 867	0	12 391 061	1 161 177	6 404 740
32. Jawa Barat	9 098 516	2 142 073	21 029 934	2 046 564	2 210 240
33. Jawa Tengah	8 184 671	575 613	12 036 862	450 221	1 626 238
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	817 760	60 476	682 440	35 344	383 269
35. Jawa Timur	10 056 430	1 113 307	15 088 249	1 332 448	2 698 599
51. Bali	1 423 941	54 704	588 483	99 235	326 361
52. Nusa Tenggara Barat	1 205 225	133 405	163 364	18 000	258 085
53. Nusa Tenggara Timur	1 085 397	36 839	68 451	29 031	190 678
61. Kalimantan Barat	1 709 628	104 318	1 335 967	60 905	436 576
62. Kalimantan Tengah	1 539 404	122 943	367 977	16 336	198 378
63. Kalimantan Selatan	1 327 333	990 820	1 136 546	85 181	264 884
64. Kalimantan Timur	1 745 202	6 738 659	7 031 143	75 642	567 193
71. Sulawesi Utara	1 046 195	279 076	371 167	31 225	367 373
72. Sulawesi Tengah	964 507	63 167	178 295	18 908	156 550
73. Sulawesi Selatan	3 516 068	418 866	1 214 728	135 134	449 215
74. Sulawesi Tenggara	528 779	47 430	128 615	16 248	130 183
81. Maluku	721 756	65 925	254 754	18 213	16 778
82. Irian Jaya	1 333 075	5 059 911	281 002	23 869	305 915
INDONESIA <sup>a)</sup>	66 370 602	34 350 202	91 426 682	6 537 492	20 493 243

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.



**Lampiran Tabel-Tabel**

Tabel 1.b. Lanjutan.

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Jasa-jasa	Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11. Daerah Istimewa Aceh	662 397	868 413	91 254	638 396	9 949 895
12. Sumatera Utara	3 991 368	1 868 581	1 509 565	1 647 684	22 910 088
13. Sumatera Barat	1 262 266	943 519	365 191	1 255 013	7 577 037
14. Riau	1 636 823	639 896	621 049	643 598	20 308 602
15. Jambi	556 965	334 364	131 548	327 510	3 181 313
16. Sumatera Selatan	2 568 058	673 368	563 356	979 582	13 659 787
17. Bengkulu	278 051	265 428	94 230	306 314	1 677 278
18. Lampung	1 084 320	566 051	382 387	625 881	6 874 387
31. DKI Jakarta	13 550 295	5 613 963	12 681 994	5 295 127	57 215 224
32. Jawa Barat	11 968 042	3 555 871	2 369 171	5 780 294	60 200 705
33. Jawa Tengah	9 026 900	1 946 927	1 559 305	3 987 777	39 394 514
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	761 002	552 812	531 007	1 000 279	4 824 389
35. Jawa Timur	11 306 813	4 441 895	3 107 680	6 248 432	55 393 853
51. Bali	2 336 696	907 690	479 402	1 082 889	7 299 401
52. Nusa Tenggara Barat	538 063	402 618	77 067	566 309	3 362 136
53. Nusa Tenggara Timur	402 340	304 295	122 708	594 473	2 834 212
61. Kalimantan Barat	1 369 996	739 834	497 864	810 970	7 066 058
62. Kalimantan Tengah	762 139	501 325	93 048	444 396	4 045 946
63. Kalimantan Selatan	876 134	656 228	183 521	522 313	6 042 960
64. Kalimantan Timur	1 960 528	2 257 788	578 835	526 657	21 481 647
71. Sulawesi Utara	488 401	561 935	121 207	623 085	3 889 664
72. Sulawesi Tengah	259 376	202 830	92 883	350 864	2 287 380
73. Sulawesi Selatan	1 617 782	746 082	429 860	1 103 342	9 631 077
74. Sulawesi Tenggara	212 197	168 184	75 398	281 424	1 588 458
81. Maluku	463 116	187 735	140 471	328 650	2 197 398
82. Irian Jaya	334 718	284 963	106 818	431 882	8 162 153
INDONESIA <sup>a)</sup>	70 274 786	30 192 595	27 006 819	36 403 141	383 055 562

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 1.c. Distribusi Persentase PDRB Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 1999

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air Minum	Konstruksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Daerah Istimewa Aceh	3.85	9.50	2.37	0.42	1.12
12. Sumatera Utara	9.66	0.88	6.72	4.32	4.18
13. Sumatera Barat	2.38	0.79	1.06	2.09	1.65
14. Riau	2.26	29.12	3.04	1.52	2.11
15. Jambi	1.30	0.85	0.48	0.39	0.38
16. Sumatera Selatan	3.55	8.47	3.08	1.91	3.29
17. Bengkulu	0.79	0.16	0.08	0.16	0.19
18. Lampung	5.30	0.24	1.09	0.79	1.83
31. DKI Jakarta	0.19	0.00	15.35	18.07	35.92
32. Jawa Barat	14.30	8.99	22.09	30.26	10.31
33. Jawa Tengah	12.59	1.07	11.81	5.70	7.28
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	1.28	0.18	0.75	0.74	1.51
35. Jawa Timur	18.65	3.39	16.45	24.29	13.81
51. Bali	1.59	0.11	0.57	1.62	1.11
52. Nusa Tenggara Barat	1.59	0.32	0.18	0.22	1.25
53. Nusa Tenggara Timur	1.23	0.09	0.04	0.32	0.79
61. Kalimantan Barat	2.13	0.24	1.49	0.99	1.70
62. Kalimantan Tengah	2.19	0.35	0.27	0.19	0.83
63. Kalimantan Selatan	1.93	2.16	1.22	0.90	1.21
64. Kalimantan Timur	2.09	17.84	9.56	0.95	2.22
71. Sulawesi Utara	1.29	0.66	0.37	0.74	2.89
72. Sulawesi Tengah	1.63	0.17	0.22	0.50	0.92
73. Sulawesi Selatan	4.99	2.05	1.05	2.03	1.84
74. Sulawesi Tenggara	0.97	0.14	0.16	0.20	0.66
81. Maluku	0.80	0.11	0.21	0.36	0.07
82. Irian Jaya	1.48	12.11	0.30	0.33	0.90
INDONESIA <sup>a)</sup>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

**Lampiran Tabel-Tabel**

Tabel 1.c. Lanjutan.

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Jasa-jasa	Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11. Daerah Istimewa Aceh	0.78	2.00	0.20	0.84	2.66
12. Sumatera Utara	6.44	5.50	3.82	4.54	6.10
13. Sumatera Barat	1.93	4.53	1.54	4.31	2.02
14. Riau	1.76	1.97	1.81	1.83	4.78
15. Jambi	0.74	1.05	0.48	0.83	0.78
16. Sumatera Selatan	3.16	2.40	2.12	2.58	3.55
17. Bengkulu	0.37	0.90	0.24	0.67	0.40
18. Lampung	1.95	1.57	1.33	1.83	2.15
31. DKI Jakarta	20.43	20.33	56.15	18.58	16.17
32. Jawa Barat	16.42	13.42	7.33	15.42	15.68
33. Jawa Tengah	12.28	6.88	5.68	11.15	9.99
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	1.15	1.83	1.59	2.18	1.16
35. Jawa Timur	18.49	14.92	9.20	16.96	15.48
51. Bali	2.39	2.74	1.32	2.23	1.43
52. Nusa Tenggara Barat	0.74	1.33	0.24	1.32	0.81
53. Nusa Tenggara Timur	0.52	0.71	0.30	0.99	0.55
61. Kalimantan Barat	1.86	1.92	1.32	1.67	1.60
62. Kalimantan Tengah	0.94	1.37	0.31	0.94	0.94
63. Kalimantan Selatan	1.18	1.98	0.60	1.35	1.45
64. Kalimantan Timur	2.15	5.78	1.31	0.96	5.49
71. Sulawesi Utara	0.71	2.02	0.48	2.39	1.06
72. Sulawesi Tengah	0.48	0.89	0.39	1.13	0.71
73. Sulawesi Selatan	1.87	2.35	1.35	2.66	2.37
74. Sulawesi Tenggara	0.39	0.39	0.28	0.82	0.47
81. Maluku	0.49	0.46	0.33	0.62	0.42
82. Irian Jaya	0.40	0.75	0.28	1.20	1.80
INDONESIA <sup>a)</sup>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 1.d. Distribusi Persentase PDRB Sektor Atas Dasar Harga Konstan 1993  
Menurut Provinsi, 1999

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air Minum	Konstruksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Daerah Istimewa Aceh	3.75	6.03	2.99	0.46	1.77
12. Sumatera Utara	10.98	0.87	5.45	5.46	4.71
13. Sumatera Barat	2.47	1.30	1.32	2.54	1.43
14. Riau	2.51	31.08	4.20	1.45	2.39
15. Jambi	1.33	0.75	0.62	0.46	0.47
16. Sumatera Selatan	4.28	7.12	2.95	1.85	3.74
17. Bengkulu	0.81	0.15	0.09	0.27	0.23
18. Lampung	3.94	0.28	1.05	1.02	2.35
31. DKI Jakarta	0.18	0.00	13.55	17.76	31.25
32. Jawa Barat	13.71	6.24	23.00	31.31	10.79
33. Jawa Tengah	12.33	1.68	13.17	6.89	7.94
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	1.23	0.18	0.75	0.54	1.87
35. Jawa Timur	15.15	3.24	16.50	20.38	13.17
51. Bali	2.15	0.16	0.64	1.52	1.59
52. Nusa Tenggara Barat	1.82	0.39	0.18	0.28	1.26
53. Nusa Tenggara Timur	1.64	0.11	0.07	0.44	0.93
61. Kalimantan Barat	2.58	0.30	1.46	0.93	2.13
62. Kalimantan Tengah	2.32	0.36	0.40	0.25	0.97
63. Kalimantan Selatan	2.00	2.88	1.24	1.30	1.29
64. Kalimantan Timur	2.63	19.62	7.69	1.16	2.77
71. Sulawesi Utara	1.58	0.81	0.41	0.48	1.79
72. Sulawesi Tengah	1.45	0.18	0.20	0.29	0.76
73. Sulawesi Selatan	5.30	1.22	1.33	2.07	2.19
74. Sulawesi Tenggara	0.80	0.14	0.14	0.25	0.64
81. Maluku	1.09	0.19	0.28	0.28	0.08
82. Irian Jaya	2.01	14.73	0.31	0.37	1.49
INDONESIA <sup>a)</sup>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

**Lampiran Tabel-Tabel**

Tabel 1.d. Lanjutan.

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Jasa-jasa	Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11. Daerah Istimewa Aceh	0.94	2.88	0.34	1.75	2.60
12. Sumatera Utara	5.68	6.19	5.59	4.53	5.98
13. Sumatera Barat	1.80	3.13	1.35	3.45	1.98
14. Riau	2.33	2.12	2.30	1.77	5.30
15. Jambi	0.79	1.11	0.49	0.90	0.83
16. Sumatera Selatan	3.65	2.23	2.09	2.69	3.57
17. Bengkulu	0.40	0.88	0.35	0.84	0.44
18. Lampung	1.54	1.87	1.42	1.72	1.79
31. DKI Jakarta	19.28	18.59	46.96	14.55	14.94
32. Jawa Barat	17.03	11.78	8.77	15.88	15.72
33. Jawa Tengah	12.85	6.45	5.77	10.95	10.28
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	1.08	1.83	1.97	2.75	1.26
35. Jawa Timur	16.09	14.71	11.51	17.16	14.46
51. Bali	3.33	3.01	1.78	2.97	1.91
52. Nusa Tenggara Barat	0.77	1.33	0.29	1.56	0.88
53. Nusa Tenggara Timur	0.57	1.01	0.45	1.63	0.74
61. Kalimantan Barat	1.95	2.45	1.84	2.23	1.84
62. Kalimantan Tengah	1.08	1.66	0.34	1.22	1.06
63. Kalimantan Selatan	1.25	2.17	0.68	1.43	1.58
64. Kalimantan Timur	2.79	7.48	2.14	1.45	5.61
71. Sulawesi Utara	0.69	1.86	0.45	1.71	1.02
72. Sulawesi Tengah	0.37	0.67	0.34	0.96	0.60
73. Sulawesi Selatan	2.30	2.47	1.59	3.03	2.51
74. Sulawesi Tenggara	0.30	0.56	0.28	0.77	0.41
81. Maluku	0.66	0.62	0.52	0.90	0.57
82. Irian Jaya	0.48	0.94	0.40	1.19	2.13
INDONESIA <sup>a)</sup>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 1.e. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 1999

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air Minum	Konstruksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Daerah Istimewa Aceh	28.86	33.54	22.00	0.18	2.27
12. Sumatera Utara	31.53	1.36	27.13	0.80	3.69
13. Sumatera Barat	23.48	3.67	12.90	1.17	4.40
14. Riau	9.41	57.14	15.69	0.36	2.38
15. Jambi	32.99	10.18	14.98	0.56	2.64
16. Sumatera Selatan	19.90	22.40	21.39	0.61	4.99
17. Bengkulu	39.32	3.71	4.85	0.47	2.62
18. Lampung	49.03	1.04	12.48	0.42	4.58
31. DKI Jakarta	0.23	0.00	23.38	1.26	11.96
32. Jawa Barat	18.15	5.38	34.70	2.18	3.54
33. Jawa Tengah	25.09	1.00	29.10	0.65	3.92
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	22.00	1.45	15.94	0.72	7.03
35. Jawa Timur	23.97	2.05	26.17	1.78	4.80
51. Bali	22.12	0.70	9.78	1.28	4.17
52. Nusa Tenggara Barat	39.25	3.77	5.43	0.30	8.36
53. Nusa Tenggara Timur	44.31	1.53	1.94	0.66	7.74
61. Kalimantan Barat	26.47	1.40	22.84	0.70	5.70
62. Kalimantan Tengah	46.33	3.52	7.17	0.23	4.76
63. Kalimantan Selatan	26.35	13.95	20.72	0.70	4.49
64. Kalimantan Timur	7.57	30.50	42.91	0.20	2.18
71. Sulawesi Utara	24.12	5.87	8.65	0.79	14.64
72. Sulawesi Tengah	45.48	2.26	7.53	0.80	6.93
73. Sulawesi Selatan	41.93	8.10	10.91	0.97	4.19
74. Sulawesi Tenggara	41.29	2.77	8.48	0.48	7.66
81. Maluku	38.09	2.43	12.02	0.96	0.95
82. Irian Jaya	16.39	63.24	4.09	0.21	2.71
INDONESIA <sup>a)</sup>	19.90	9.38	24.63	1.13	5.38

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

**Lampiran Tabel-Tabel**

Tabel 1.c. Lanjutan.

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Jasa-jasa	Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11. Daerah Istimewa Aceh	5.47	4.50	0.48	2.70	100.00
12. Sumatera Utara	19.74	5.39	4.02	6.34	100.00
13. Sumatera Barat	17.91	13.40	4.89	18.18	100.00
14. Riau	6.87	2.46	2.43	3.26	100.00
15. Jambi	17.65	8.02	3.96	9.01	100.00
16. Sumatera Selatan	16.65	4.04	3.84	6.20	100.00
17. Bengkulu	17.28	13.57	3.86	14.33	100.00
18. Lampung	16.92	4.34	3.97	7.23	100.00
31. DKI Jakarta	23.62	7.51	22.26	9.78	100.00
32. Jawa Barat	19.58	5.11	3.00	8.37	100.00
33. Jawa Tengah	22.99	4.11	3.65	9.49	100.00
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	18.61	9.46	8.78	16.01	100.00
35. Jawa Timur	22.33	5.76	3.81	9.33	100.00
51. Bali	31.29	11.43	5.94	13.30	100.00
52. Nusa Tenggara Barat	17.23	9.86	1.91	13.89	100.00
53. Nusa Tenggara Timur	17.46	7.70	3.47	15.19	100.00
61. Kalimantan Barat	21.63	7.15	5.27	8.84	100.00
62. Kalimantan Tengah	18.66	8.68	2.09	8.55	100.00
63. Kalimantan Selatan	15.18	8.11	2.64	7.88	100.00
64. Kalimantan Timur	7.32	6.30	1.54	1.49	100.00
71. Sulawesi Utara	12.57	11.35	2.88	19.14	100.00
72. Sulawesi Tengah	12.59	7.44	3.55	13.42	100.00
73. Sulawesi Selatan	14.77	5.92	3.65	9.57	100.00
74. Sulawesi Tenggara	15.52	5.01	3.79	15.00	100.00
81. Maluku	21.59	6.48	4.96	12.52	100.00
82. Irian Jaya	4.20	2.49	1.00	5.68	100.00
INDONESIA <sup>a)</sup>	18.69	5.97	6.41	8.51	100.00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 1.f. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 1993  
Menurut Lapangan Usaha, 1999

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air Minum	Konstruksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Daerah Istimewa Aceh	25.01	20.82	27.51	0.30	3.64
12. Sumatera Utara	31.81	1.30	21.76	1.56	4.21
13. Sumatera Barat	21.60	5.90	15.94	2.20	3.86
14. Riau	8.20	52.57	18.92	0.47	2.41
15. Jambi	27.68	8.08	17.82	0.95	3.03
16. Sumatera Selatan	20.79	17.90	19.77	0.89	5.62
17. Bengkulu	32.00	3.17	4.66	1.04	2.84
18. Lampung	38.02	1.38	13.95	0.97	7.00
31. DKI Jakarta	0.20	0.00	21.66	2.03	11.19
32. Jawa Barat	15.11	3.56	34.93	3.40	3.67
33. Jawa Tengah	20.78	1.46	30.55	1.14	4.13
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	16.95	1.25	14.15	0.73	7.94
35. Jawa Timur	18.15	2.01	27.24	2.41	4.87
51. Bali	19.51	0.75	8.06	1.36	4.47
52. Nusa Tenggara Barat	35.85	3.97	4.86	0.54	7.68
53. Nusa Tenggara Timur	38.30	1.30	2.42	1.02	6.73
61. Kalimantan Barat	24.19	1.48	18.91	0.86	6.18
62. Kalimantan Tengah	38.05	3.04	9.09	0.40	4.90
63. Kalimantan Selatan	21.96	16.40	18.81	1.41	4.38
64. Kalimantan Timur	8.12	31.37	32.73	0.35	2.64
71. Sulawesi Utara	26.90	7.17	9.54	0.80	9.44
72. Sulawesi Tengah	42.17	2.76	7.79	0.83	6.84
73. Sulawesi Selatan	36.51	4.35	12.61	1.40	4.66
74. Sulawesi Tenggara	33.29	2.99	8.10	1.02	8.20
81. Maluku	32.85	3.00	11.59	0.83	0.76
82. Irian Jaya	16.33	61.99	3.44	0.29	3.75
INDONESIA <sup>a)</sup>	17.33	8.97	23.87	1.71	5.35

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.



**Lampiran Tabel-Tabel**

Tabel 1.f. Lanjutan.

Provinsi	Lapangan Usaha				
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Jasa-jasa	Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11. Daerah Istimewa Aceh	6.66	8.73	0.92	6.42	100.00
12. Sumatera Utara	17.42	8.16	6.59	7.19	100.00
13. Sumatera Barat	16.66	12.45	4.82	16.56	100.00
14. Riau	8.06	3.15	3.06	3.17	100.00
15. Jambi	17.51	10.51	4.14	10.29	100.00
16. Sumatera Selatan	18.80	4.93	4.12	7.17	100.00
17. Bengkulu	16.58	15.82	5.62	18.26	100.00
18. Lampung	15.77	8.23	5.56	9.10	100.00
31. DKI Jakarta	23.68	9.81	22.17	9.25	100.00
32. Jawa Barat	19.88	5.91	3.94	9.60	100.00
33. Jawa Tengah	22.91	4.94	3.96	10.12	100.00
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	15.77	11.46	11.01	20.73	100.00
35. Jawa Timur	20.41	8.02	5.61	11.28	100.00
51. Bali	32.01	12.44	6.57	14.84	100.00
52. Nusa Tenggara Barat	16.00	11.98	2.29	16.84	100.00
53. Nusa Tenggara Timur	14.20	10.74	4.33	20.97	100.00
61. Kalimantan Barat	19.39	10.47	7.05	11.48	100.00
62. Kalimantan Tengah	18.84	12.39	2.30	10.98	100.00
63. Kalimantan Selatan	14.50	10.86	3.04	8.64	100.00
64. Kalimantan Timur	9.13	10.51	2.69	2.45	100.00
71. Sulawesi Utara	12.56	14.45	3.12	16.02	100.00
72. Sulawesi Tengah	11.34	8.87	4.06	15.34	100.00
73. Sulawesi Selatan	16.80	7.75	4.46	11.46	100.00
74. Sulawesi Tenggara	13.36	10.59	4.75	17.72	100.00
81. Maluku	21.08	8.54	6.39	14.96	100.00
82. Irian Jaya	4.10	3.49	1.31	5.29	100.00
INDONESIA <sup>a)</sup>	18.35	7.88	7.05	9.50	100.00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1997-2000.

Keterangan: a) Angka Indonesia ini merupakan kumulatif dari PDRB 26 Provinsi.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 2. Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan dan Provinsi, 1999

Provinsi	Menggunakan Listrik Sebagai Sumber Penerangan Rumah <sup>a)</sup>	Tanpa Akses Terhadap Air Bersih <sup>b)</sup>	Sebagian Besar Lantai Rumah Terbuat dari Tanah <sup>a)</sup>	Status Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri <sup>a)</sup>	Tempat Penampungan Akhir Kotoran/ Tinja Tangki Septik <sup>a)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Daerah Istimewa Aceh	70.19	61.5	11.14	50.98	30.36
12. Sumatera Utara	85.58	47.9	4.00	71.22	42.23
13. Sumatera Barat	72.72	46.4	1.91	38.38	29.31
14. Riau	64.53	71.8	2.61	77.90	35.12
15. Jambi	59.15	57.3	6.19	56.54	28.65
16. Sumatera Selatan	67.65	59.7	11.08	57.92	37.35
17. Bengkulu	69.67	59.2	12.09	56.52	33.78
18. Lampung	43.06	54.4	34.37	74.76	26.41
31. DKI Jakarta	99.86	40.2	0.35	78.06	83.14
32. Jawa Barat	92.64	62.1	7.12	50.95	37.04
33. Jawa Tengah	92.59	47.8	37.76	50.40	33.71
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	95.24	48.9	15.76	60.56	53.54
35. Jawa Timur	92.35	43.0	28.26	48.21	32.54
51. Bali	94.88	34.2	5.55	55.22	61.54
52. Nusa Tenggara Barat	81.65	62.5	19.30	32.09	32.81
53. Nusa Tenggara Timur	34.16	41.9	48.07	62.53	15.06
61. Kalimantan Barat	62.55	78.4	1.25	53.00	28.08
62. Kalimantan Tengah	62.73	68.2	1.88	48.68	21.90
63. Kalimantan Selatan	76.56	46.7	2.49	53.44	24.58
64. Kalimantan Timur	87.01	35.8	1.42	71.31	46.43
71. Sulawesi Utara	82.13	44.5	9.74	50.41	48.61
72. Sulawesi Tengah	62.77	51.7	13.79	41.09	31.65
73. Sulawesi Selatan	73.58	49.1	3.50	51.96	40.05
74. Sulawesi Tenggara	58.08	43.6	14.24	56.24	27.66
81. Maluku	67.59	52.1	23.39	36.78	39.60
82. Irian Jaya	35.76	54.5	12.56	44.44	21.41
INDONESIA	83.73	51.9	17.05	54.11	37.07

Sumber: a) Statistik Kesejahteraan Rakyat, 1999.

b) Laporan Pembangunan Manusia 2001, "Menuju Konsensus Baru, Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia".

Keterangan: - Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 3. Beberapa Karakteristik Pendidikan Penduduk Menurut Provinsi, 1999

Provinsi	Angka Buta Huruf <sup>a)</sup>	Tamat Diploma Ke Atas <sup>a)</sup>	Angka Partisipasi Sekolah (APS) <sup>a)</sup>			Angka Rasio Murid Guru <sup>b)</sup>		
			7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	Tahun Ajaran 1999/2000		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	SD	SLTP	SLTA
11. Daerah Istimewa Aceh	6.03	2.65	96.34	81.69	48.40	23.14	14.21	11.52
12. Sumatera Utara	3.64	2.77	97.22	87.40	63.90	23.69	16.55	13.22
13. Sumatera Barat	4.66	3.61	96.71	84.04	63.94	21.20	14.10	12.01
14. Riau	3.99	2.78	96.26	85.20	53.38	24.46	16.63	15.28
15. Jambi	5.43	2.48	96.16	81.06	49.78	19.98	14.77	13.79
16. Sumatera Selatan	5.62	2.07	95.18	77.00	47.06	23.17	16.98	13.24
17. Bengkulu	6.39	2.83	95.38	82.24	55.57	19.42	17.41	13.70
18. Lampung	7.06	1.86	95.08	81.01	49.59	23.46	16.34	12.04
31. DKI Jakarta	2.00	9.46	98.38	92.44	73.39	23.38	15.18	13.77
32. Jawa Barat	6.85	3.12	95.37	72.17	45.36	30.26	21.15	15.48
33. Jawa Tengah	13.27	2.40	97.36	81.52	49.39	22.04	19.89	15.14
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	13.37	6.35	99.19	95.43	80.58	15.50	13.40	11.03
35. Jawa Timur	16.69	2.45	95.41	80.44	50.29	19.24	17.07	13.91
51. Bali	15.54	4.27	96.70	83.57	63.43	15.31	13.47	11.80
52. Nusa Tenggara Barat	23.16	1.98	93.00	71.47	41.84	25.79	16.70	14.21
53. Nusa Tenggara Timur	17.62	1.90	88.99	69.68	34.35	23.33	15.94	14.82
61. Kalimantan Barat	14.47	2.15	90.31	75.96	40.99	22.13	17.78	12.93
62. Kalimantan Tengah	4.50	2.55	97.46	80.57	49.46	14.52	14.66	12.23
63. Kalimantan Selatan	6.42	2.69	94.68	72.24	43.00	16.93	14.21	12.71
64. Kalimantan Timur	5.76	4.35	97.04	84.62	58.26	20.26	16.58	14.28
71. Sulawesi Utara	2.61	3.22	93.64	76.68	46.47	15.32	13.12	13.33
72. Sulawesi Tengah	6.56	2.55	94.56	69.43	38.94	18.81	13.13	11.44
73. Sulawesi Selatan	14.96	3.60	91.09	69.60	44.97	19.94	16.06	12.52
74. Sulawesi Tenggara	10.90	2.62	93.94	76.97	49.86	22.39	18.75	16.58
81. Maluku	3.68	3.28	94.39	84.84	61.92	21.26	16.87	14.80
82. Irian Jaya	25.57	2.43	82.77	75.54	50.52	19.99	15.34	13.77
INDONESIA	10.21	3.10	95.34	79.04	51.14	22.45	17.23	13.78

Sumber: a) Statistik Kesejahteraan Rakyat, 1999.

b) Diolah dari data jumlah guru dan jumlah murid pada Statistik Indonesia, 2000.

Keterangan: - Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 4. Beberapa Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Menurut Provinsi, 1999

Provinsi	Persentase Penduduk Yang Bekerja <sup>a)</sup>	Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu <sup>b)</sup>		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <sup>b)</sup> (persen)	Angka Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup> (persen)	Pekerja di Sektor Informal <sup>b)</sup> (persen)
		< 14 jam	< 35 jam			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Daerah Istimewa Aceh	53.85	12.9	48.8	67.8	6.8	75.4
12. Sumatera Utara	54.40	7.8	37.6	68.0	6.6	67.3
13. Sumatera Barat	53.08	15.1	46.7	65.4	5.9	73.0
14. Riau	49.17	7.7	39.9	62.1	6.8	70.9
15. Jambi	50.40	8.0	42.6	62.4	4.2	73.9
16. Sumatera Selatan	52.74	8.3	42.8	66.2	5.5	68.3
17. Bengkulu	58.17	7.1	34.9	70.8	3.8	78.7
18. Lampung	57.60	10.0	39.1	69.8	3.7	71.7
31. DKI Jakarta	45.79	3.5	12.4	58.8	13.2	38.6
32. Jawa Barat	48.44	9.3	36.0	61.2	9.0	58.9
33. Jawa Tengah	57.98	11.0	41.1	70.0	5.6	64.6
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	60.24	10.6	34.4	68.8	4.7	63.6
35. Jawa Timur	57.52	15.3	46.6	67.4	5.0	61.1
51. Bali	67.66	8.4	36.3	76.3	3.5	68.7
52. Nusa Tenggara Barat	58.85	21.2	54.1	70.9	4.7	69.0
53. Nusa Tenggara Timur	63.32	15.3	59.4	75.0	2.8	88.9
61. Kalimantan Barat	59.17	10.0	44.3	72.9	4.7	75.5
62. Kalimantan Tengah	55.98	5.3	34.9	68.1	4.0	76.2
63. Kalimantan Selatan	60.88	11.4	43.9	71.9	3.9	78.1
64. Kalimantan Timur	51.53	7.6	31.2	64.1	7.7	66.4
71. Sulawesi Utara	50.25	9.8	39.0	61.8	9.3	67.6
72. Sulawesi Tengah	56.24	12.8	45.3	67.3	4.0	78.1
73. Sulawesi Selatan	48.17	17.5	53.5	58.2	6.4	78.3
74. Sulawesi Tenggara	53.12	13.7	46.7	66.5	5.8	80.0
81. Maluku	48.44	13.4	51.7	61.2	7.6	79.4
82. Irian Jaya	64.48	9.7	61.1	76.1	3.4	85.4
INDONESIA	54.17	11.1 <sup>c)</sup>	40.9 <sup>c)</sup>	66.1 <sup>c)</sup>	6.5 <sup>c)</sup>	65.2 <sup>c)</sup>

Sumber: <sup>a)</sup> Statistik Kesejahteraan Rakyat, 1999.<sup>b)</sup> Laporan Pembangunan Manusia 2001, "Menuju Konsensus Baru, Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia"<sup>c)</sup> Angka Indonesia merupakan rata-rata tertimbang dari angka provinsi, dengan jumlah penduduk sebagai penimbang.

Keterangan: - Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 5. Beberapa Karakteristik Kesehatan Penduduk Menurut Provinsi, 1999

Provinsi	Angka Harapan Hidup <sup>b)</sup> (tahun)	Angka Kematian Bayi <sup>b)</sup> (per 1000 kelahiran hidup)	Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Yang Lalu <sup>a)</sup> (persen)	Penduduk Yang Melakukan Pengobatan Sendiri <sup>a)</sup> (persen)	Kelahiran Terakhir Ditolong Oleh Tenaga Medis <sup>a)</sup> (persen)	Rata-rata Lamanya Sakit <sup>b)</sup> (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Daerah Istimewa Aceh	66.4	39	21.96	57.50	65.71	6.8
12. Sumatera Utara	65.7	41	15.84	62.06	77.22	5.9
13. Sumatera Barat	63.8	48	31.97	53.94	77.83	6.9
14. Riau	66.9	38	17.25	66.33	63.77	5.3
15. Jambi	65.5	43	17.60	58.56	52.88	6.1
16. Sumatera Selatan	64.1	48	21.41	61.68	63.28	5.1
17. Bengkulu	63.8	49	17.80	53.68	67.29	6.3
18. Lampung	64.5	46	25.64	61.75	52.55	5.3
31. DKI Jakarta	70.2	24	28.86	67.76	94.11	4.6
32. Jawa Barat	62.9	53	22.16	69.21	45.65	6.1
33. Jawa Tengah	64.8	36	28.59	61.51	52.96	5.6
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	69.9	25	33.20	55.06	75.84	5.7
35. Jawa Timur	63.8	48	25.67	61.36	59.60	6.2
51. Bali	68.1	31	31.31	45.81	88.50	5.3
52. Nusa Tenggara Barat	54.9	81	33.76	57.67	26.86	6.5
53. Nusa Tenggara Timur	62.2	56	36.66	44.64	27.18	6.8
61. Kalimantan Barat	62.9	54	20.42	61.14	42.87	6.0
62. Kalimantan Tengah	68.3	32	16.81	66.96	52.53	5.7
63. Kalimantan Selatan	60.3	67	31.07	70.36	49.61	5.4
64. Kalimantan Timur	68.1	33	25.61	57.90	63.04	5.5
71. Sulawesi Utara	66.6	37	23.47	56.89	67.02	5.9
72. Sulawesi Tengah	60.6	60	20.67	61.91	43.74	6.9
73. Sulawesi Selatan	65.0	36	24.18	57.33	45.82	6.7
74. Sulawesi Tenggara	63.6	50	16.95	63.62	27.23	6.5
81. Maluku	63.1	40	16.46	78.16	40.91	6.8
82. Irian Jaya	62.7	52	22.55	25.40	46.06	5.5
INDONESIA	64.4 <sup>c)</sup>	45 <sup>c)</sup>	24.65	61.74	55.79	5.9 <sup>c)</sup>

Sumber: <sup>a)</sup> Statistik Kesejahteraan Rakyat, 1999.<sup>b)</sup> Laporan Pembangunan Manusia 2001, "Menuju Konsensus Baru, Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia"<sup>c)</sup> Angka Indonesia merupakan rata-rata tertimbang dari angka provinsi, dengan jumlah penduduk sebagai penimbang.

Keterangan: - Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

<sup>b)</sup> Ekstrapolasi dari hasil Sensus Penduduk (SP) 1971, SP 1980, SP 1990, Survei Antar Sensus 1995 dan Susenas 1996.

Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas  
Menurut Beberapa Indikator Kesenangan/Sosial Budaya dan Provinsi, 2000.

Provinsi	Menonton Televisi Seminggu Yang lalu	Mendengarkan Siaran Radio Seminggu Yang Lalu	Membaca Surat Kabar/ Majalah Seminggu Yang Lalu	Melakukan Olahraga Seminggu Yang Lalu
(1)	(2)	(3)		(7)
11. Daerah Istimewa Aceh <sup>b)</sup>	58.4	30.8	21.0	16.5
12. Sumatera Utara	79.9	29.3	26.9	18.8
13. Sumatera Barat	71.4	31.1	26.2	24.2
14. Riau	82.5	39.1	28.0	27.7
15. Jambi	66.7	23.8	12.7	21.2
16. Sumatera Selatan	80.5	40.2	24.2	20.8
17. Bengkulu	68.4	36.2	18.8	26.3
18. Lampung	77.2	49.3	12.6	23.2
31. DKI Jakarta	93.5	56.0	65.3	31.6
32. Jawa Barat	83.0	48.1	29.2	25.1
33. Jawa Tengah	83.1	47.5	21.3	22.1
34. Daerah Istimewa Yogyakarta	85.2	60.7	43.4	29.8
35. Jawa Timur	80.5	44.7	21.6	19.8
51. Bali	86.9	58.1	33.6	22.3
52. Nusa Tenggara Barat	70.6	35.2	14.9	21.4
53. Nusa Tenggara Timur	28.1	16.1	12.2	15.4
61. Kalimantan Barat	71.7	26.7	19.1	22.3
62. Kalimantan Tengah	66.0	44.0	21.6	20.2
63. Kalimantan Selatan	76.5	43.8	22.1	17.6
64. Kalimantan Timur	82.4	24.4	31.7	26.3
71. Sulawesi Utara	74.5	35.7	28.5	20.5
72. Sulawesi Tengah	74.6	28.6	18.7	25.3
73. Sulawesi Selatan	66.4	42.8	18.5	19.2
74. Sulawesi Tenggara	67.2	26.1	12.9	24.5
81. Maluku <sup>b)</sup>	66.5	18.7	24.9	21.9
82. Irian Jaya	26.6	20.9	11.2	17.8
INDONESIA <sup>a)</sup>	78.9	43.2	25.4	22.6

Sumber: Statistik Sosial Budaya, Hasil Susenas 2000.

Keterangan: a) Tidak termasuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Maluku.

b) Angka estimasi tahun 2000 dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan per tahun setiap variabel selama periode 1994-2000 dari data Provinsi Sulawesi Tengah.

- Angka di depan nama provinsi adalah kode daerah.

Tabel 7.a. Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi  
Berdasarkan Keseluruhan Variabel, 1999

Provinsi	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Tingkat Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
11. Dista Aceh	1.600938596	0.267636957	13
12. Sumatera Utara	1.155098147	0.193103567	3
13. Sumatera Barat	1.507622722	0.252036873	11
14. Riau	1.415433034	0.236625059	6
15. Jambi	1.504762514	0.251558718	10
16. Sumatera Selatan	1.530492489	0.255860127	12
17. Bengkulu	1.471426415	0.245985754	8
18. Lampung	1.752647831	0.292998953	21
31. DKI Jakarta	0	0	1
32. Jawa Barat	1.667741237	0.27880469	14
33. Jawa Tengah	1.703694281	0.284815142	16
34. Dista Yogyakarta	1.195722438	0.199894934	4
35. Jawa Timur	1.709455497	0.285778273	17
51. Bali	1.401280247	0.234259067	5
52. Nusa Tenggara Barat	2.147623385	0.359029003	24
53. Nusa Tenggara Timur	2.312401016	0.386575708	26
61. Kalimantan Barat	1.925250347	0.321853784	23
62. Kalimantan Tengah	1.718926007	0.287361506	19
63. Kalimantan Selatan	1.741039549	0.291058338	20
64. Kalimantan Timur	1.009261307	0.168723289	2
71. Sulawesi Utara	1.432576306	0.239490986	7
72. Sulawesi Tengah	1.858655112	0.310720723	22
73. Sulawesi Selatan	1.700719228	0.284317787	15
74. Sulawesi Tenggara	1.713183049	0.286401427	18
81. Maluku	1.496541152	0.250184311	9
82. Irian Jaya	2.20924831	0.369331151	25

Tabel 7.b. Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi  
Berdasarkan Variabel Perumahan, 1999

Provinsi	Pattern Of Development	Measure Of Development	Peringkat Tingkat Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
11. Dista Aceh	1.029551334	0.26160944	16
12. Sumatera Utara	0.634596471	0.161251238	5
13. Sumatera Barat	1.05939936	0.269193837	18
14. Riau	0.982980105	0.249775671	12
15. Jambi	1.022266377	0.25975833	15
16. Sumatera Selatan	0.908337347	0.230808914	9
17. Bengkulu	0.945340789	0.240211505	10
18. Lampung	1.193736589	0.303328985	22
31. DKI Jakarta	0	0	1
32. Jawa Barat	0.901918189	0.229177803	8
33. Jawa Tengah	1.043641706	0.26518981	17
34. Dista Yogyakarta	0.592122465	0.150458575	4
35. Jawa Timur	0.985875295	0.25051134	13
51. Bali	0.508525111	0.129216451	2
52. Nusa Tenggara Barat	1.179295489	0.299659495	21
53. Nusa Tenggara Timur	1.459639352	0.370894992	26
61. Kalimantan Barat	1.207342502	0.306786253	24
62. Kalimantan Tengah	1.198721617	0.304595683	23
63. Kalimantan Selatan	0.972708736	0.247165712	11
64. Kalimantan Timur	0.560730716	0.142481918	3
71. Sulawesi Utara	0.719722502	0.1828818	6
72. Sulawesi Tengah	1.082997401	0.275190109	20
73. Sulawesi Selatan	0.823614318	0.209280755	7
74. Sulawesi Tenggara	1.013324337	0.257486154	14
81. Maluku	1.07765824	0.273833426	19
82. Irian Jaya	1.304573738	0.331492753	25



Tabel 7. c. Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi  
Berdasarkan Variabel Pendidikan, 1999

Provinsi	Pattern Of Development	Measure Of Development	Peringkat Tingkat Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
11. Dista Aceh	1.091050783	0.252833044	11
12. Sumatera Utara	0.887254616	0.20560664	5
13. Sumatera Barat	0.85683648	0.198557738	4
14. Riau	0.988331903	0.229029636	7
15. Jambi	1.06739819	0.247351946	10
16. Sumatera Selatan	1.181073976	0.273694436	14
17. Bengkulu	1.0189435	0.23612337	9
18. Lampung	1.164468619	0.269846418	12
31. DKI Jakarta	0	0	1
32. Jawa Barat	1.368195814	0.317056839	21
33. Jawa Tengah	1.214330975	0.281401198	17
34. Dista Yogyakarta	0.822775486	0.190664664	3
35. Jawa Timur	1.188159996	0.275336505	16
51. Bali	1.009800325	0.234004589	8
52. Nusa Tenggara Barat	1.480189003	0.343009416	24
53. Nusa Tenggara Timur	1.567454619	0.363231785	25
61. Kalimantan Barat	1.380793635	0.319976177	22
62. Kalimantan Tengah	1.172215151	0.27164155	13
63. Kalimantan Selatan	1.275646277	0.295610009	19
64. Kalimantan Timur	0.786053258	0.182154893	2
71. Sulawesi Utara	1.185727098	0.274772721	15
72. Sulawesi Tengah	1.384286357	0.320785558	23
73. Sulawesi Selatan	1.304237581	0.302235573	20
74. Sulawesi Tenggara	1.252884692	0.290335387	18
81. Maluku	0.903474652	0.209365366	6
82. Irian Jaya	1.620012084	0.375411111	26

Tabel 7.d. Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi  
Berdasarkan Variabel Ketenagakerjaan, 1999

Provinsi	Pattern Of Development	Measure Of Development	Peringkat Tingkat Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
11. Dista Aceh	1.361544304	0.266197753	14
12. Sumatera Utara	1.09886824	0.214841527	6
13. Sumatera Barat	1.363955623	0.266669194	15
14. Riau	1.062644987	0.207759459	5
15. Jambi	1.265812385	0.24748105	10
16. Sumatera Selatan	1.183547367	0.231397281	7
17. Bengkulu	1.413721329	0.276398969	17
18. Lampung	1.381244662	0.270049403	16
31. DKI Jakarta	0	0	1
32. Jawa Barat	0.798600109	0.156135613	2
33. Jawa Tengah	1.260828563	0.246506654	9
34. Dista Yogyakarta	1.249702038	0.244331289	8
35. Jawa Timur	1.361173649	0.266125286	13
51. Bali	1.576237593	0.30817279	23
52. Nusa Tenggara Barat	1.703843805	0.333121289	24
53. Nusa Tenggara Timur	1.985474294	0.388183326	26
61. Kalimantan Barat	1.476683331	0.288708773	19
62. Kalimantan Tengah	1.30796315	0.255722015	11
63. Kalimantan Selatan	1.559698942	0.304939291	22
64. Kalimantan Timur	0.907500807	0.177426967	3
71. Sulawesi Utara	0.946629237	0.18507703	4
72. Sulawesi Tengah	1.485943404	0.290519225	20
73. Sulawesi Selatan	1.486464048	0.290621017	21
74. Sulawesi Tenggara	1.427362216	0.279065921	18
81. Maluku	1.353374673	0.264600496	12
82. Irian Jaya	1.905122372	0.372473591	25

Tabel 7.e. Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi  
Berdasarkan Variabel Kesehatan, 1999

Provinsi	Pattern Of Development	Measure Of Development	Peringkat Tingkat Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
11. Dista Aceh	0.885810271	0.211328159	14
12. Sumatera Utara	0.737059243	0.175840559	11
13. Sumatera Barat	0.970410513	0.231511278	17
14. Riau	0.631511347	0.150659949	5
15. Jambi	0.883729946	0.210831855	13
16. Sumatera Selatan	0.709317503	0.169222199	8
17. Bengkulu	0.946853469	0.225891263	15
18. Lampung	0.733575654	0.175009478	10
31. DKI Jakarta	0	0	1
32. Jawa Barat	0.990391814	0.236278226	18
33. Jawa Tengah	0.691906507	0.16506845	7
34. Dista Yogyakarta	0.498445935	0.118914474	2
35. Jawa Timur	0.854605589	0.203883644	12
51. Bali	0.532747448	0.127097801	3
52. Nusa Tenggara Barat	1.640814986	0.391449978	26
53. Nusa Tenggara Timur	1.352582681	0.322686266	25
61. Kalimantan Barat	1.023206387	0.244106813	19
62. Kalimantan Tengah	0.723860126	0.172691639	9
63. Kalimantan Selatan	1.073118484	0.256014365	20
64. Kalimantan Timur	0.539675486	0.128750626	4
71. Sulawesi Utara	0.65622229	0.15655525	6
72. Sulawesi Tengah	1.265508494	0.301912937	24
73. Sulawesi Selatan	0.969908972	0.231391625	16
74. Sulawesi Tenggara	1.191037135	0.284146271	22
81. Maluku	1.1412486	0.272268198	21
82. Irian Jaya	1.247255565	0.297558328	23

Tabel 7.f. Peringkat Tingkat Hidup Antar Provinsi  
Berdasarkan Variabel Kesenangan/Sosial Budaya, 2000

Provinsi	Pola Pembangunan	Ukuran Pembangunan	Peringkat Tingkat Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
11. Dista Aceh	1.251020855	0.302329383	24
12. Sumatera Utara	1.045683934	0.252706402	15
13. Sumatera Barat	0.925418191	0.223642244	7
14. Riau	0.752105064	0.181758329	5
15. Jambi	1.234440187	0.298322397	23
16. Sumatera Selatan	0.955758157	0.230974386	10
17. Bengkulu	0.972804342	0.235093872	11
18. Lampung	1.046057352	0.252796644	16
31. DKI Jakarta	0	0	1
32. Jawa Barat	0.738557637	0.178484374	4
33. Jawa Tengah	0.930498806	0.224870056	8
34. Dista Yogyakarta	0.416813658	0.100729749	2
35. Jawa Timur	1.003252871	0.24245225	12
51. Bali	0.734303184	0.177456217	3
52. Nusa Tenggara Barat	1.118272026	0.270248486	21
53. Nusa Tenggara Timur	1.625738645	0.392885985	26
61. Kalimantan Barat	1.089300365	0.263247016	18
62. Kalimantan Tengah	1.039285055	0.251160009	14
63. Kalimantan Selatan	1.077854845	0.260481022	17
64. Kalimantan Timur	0.841722647	0.203415864	6
71. Sulawesi Utara	0.948778202	0.229287567	9
72. Sulawesi Tengah	1.01574849	0.245472018	13
73. Sulawesi Selatan	1.110033502	0.268257513	20
74. Sulawesi Tenggara	1.152491976	0.278518289	22
81. Maluku	1.109178679	0.268050932	19
82. Irian Jaya	1.558308405	0.376590379	25

Tabel 8. Pendekatan Konsep Pekerja Informal di Indonesia  
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional dan Teknisi dan yang Sejenis	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	Tenaga Tata Usaha dan Yang Sejenis	Tenaga Usaha Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	Tenaga Produksi	Operator Alat-alat Angkutan	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha dengan dibantu ART/ buruh tak tetap	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha dengan buruh tetap	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja/Buruh/ Karyawan	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	F
Pekerja tak dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Catatan:

F = Pekerja Formal

INF = Pekerja Informal

Tabel 9. Rata-rata dan Standar Deviasi Beberapa Variabel Terpilih  
Dalam Penghitungan Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi 1999

No. Urut	Indikator/Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indikator Perumahan</b>			
1.	Persentase rumahtangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah	72.4877	17.9241
2.	Persentase rumahtangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih	52.4385	10.8454
3.	Persentase rumahtangga yang memiliki lantai rumah sebagian besar terbuat dari tanah	12.6854	12.5077
4.	Persentase rumahtangga yang memiliki sendiri fasilitas buang air besar	54.9842	12.1535
5.	Persentase rumahtangga yang memiliki tangki septik sebagai tempat penampungan akhir	36.2523	14.0097
<b>Indikator Pendidikan</b>			
1.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang buta huruf	9.4904	6.4304
2.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan diploma keatas	3.17	1.5976
3.	Angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun (persen)	94.7158	3.4014
4.	Angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 13-15 tahun (persen)	79.7235	6.7688
5.	Angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun (persen)	52.1015	10.6279
6.	Rasio murid terhadap guru tingkat SD (murid per guru)	20.9582	3.613
7.	Rasio murid terhadap guru tingkat SLTP (murid per guru)	16.0107	2.0308
8.	Rasio murid terhadap guru tingkat SLTA (murid per guru)	13.4444	1.4052
<b>Indikator Ketenagakerjaan</b>			
1.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang bekerja	55.2873	5.5401
2.	Persentase pekerja yang jumlah jam kerja per minggunya < 14 jam	10.8731	3.9375
3.	Persentase pekerja yang jumlah jam kerja per minggunya < 35 jam	42.4731	9.8564
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	67.2692	5.0561
5.	Angka pengangguran terbuka (persen)	5.7154	2.3016
6.	Persentase pekerja di sektor informal	71.4462	9.8387

Tabel 9. Lanjutan.

No. Urut	Nama Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Indikator Kesehatan-</b>		
1.	Angka harapan hidup waktu lahir (tahun)	64.5654	3.2343
2.	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	44.8846	12.7979
3.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan yang lalu	24.1488	6.1633
4.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang melakukan pengobatan sendiri	59.1612	9.9099
5.	Persentase balita kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga medis	56.5408	17.6542
6.	Rata-rata lamanya sakit (hari)	5.9769	0.6364
	<b>Indikator Kesenangan/Sosial Budaya</b>		
1.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang menonton televisi seminggu yang lalu	71.2512	15.3951
2.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang mendengarkan siaran radio seminggu yang lalu	36.8823	12.2512
3.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang membaca surat kabar/majalah seminggu yang lalu	24.1142	11.3457
4.	Persentase penduduk 10 tahun keatas yang melakukan olahraga seminggu yang lalu	22.3762	3.9682